

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH  
OLEH BANK SAMPAH  
DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**



**TESIS**

**Disusun oleh :**

**CIPTA NUGRAHA**

**NIM. 191003631010386**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2022**



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH  
OLEH BANK SAMPAH  
DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**Disusun Oleh:**

**CIPTA NUGRAHA**

**NIM. 191003631010386**

Program Studi: Magister Administrasi Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2022**



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH  
OLEH BANK SAMPAH  
DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

**CIPTA NUGRAHA**

**NIM. 191003631010386**

Program Studi: Magister Administrasi Publik

**TESIS**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal tertera di bawah ini

Semarang, Maret 2022.

Menyetujui,  
Pembimbing

(Dr. Indra Kertati, M. Si)  
NIDN 0601086401

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

(Dr. Tri Lestari Hadjati, M. Si)  
NIDN 0618056501



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH  
OLEH BANK SAMPAH  
DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

**CIPTA NUGRAHA**  
**NIM. 191003631010386**  
Program Studi: Magister Administrasi Publik

**TESIS**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal tertera di bawah ini:

Semarang, Maret 2022.

1. Dr. Indra Kertati, M.Si  
Ketua Tim Penguji / Pembimbing

.....  


2. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS  
Penguji 2

.....

Mengesahkan,  
Dekan FISIP UNTAG Semarang  
  
Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS  
NIDN 0621105901



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Semarang, Maret 2022

ng membuat pernyataan,



CIPTA NUGRAHA

NIM. 1910036310103

## ABSTRAK

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan pola 3R berbasis masyarakat dengan bentuk Bank sampah. Penanganan di tempat atau penanganan sampah pada sumbernya merupakan perlakuan terhadap sampah yang masih memiliki nilai ekonomis yang dilakukan sebelum sampah sampai di tempat pembuangan. Pengelolaan ini akan dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana serta belum berkembangnya struktur, manajemen serta sumber daya manusia. Pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat mulai berkembang namun belum signifikan baik cakupan dan skala layanan. Dari beberapa kelompok masyarakat pengelola Bank sampah hanya ada beberapa kelompok saja yang aktif dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif, bertumpu pada pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data mengacu peraturan terkait persampahan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil analisis menunjukkan melalui pendekatan partisipatif, masyarakat mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan sendiri masalah, potensi, ancaman, dan hambatan masalah Sampah, serta menemukan solusi masalah sampah. Dalam mengelola sampah, masyarakat mampu mengorganisir diri dalam kegiatan bersama untuk memecahkan masalah sampah, sebagai bentuk kesadaran tinggi dalam merespon masalah sampah dan bertindak atas dasar kepentingan bersama.

Kata Kunci :implementasi, bank sampah, struktur, manajemen,sumberdaya.

## ABSTRACT

*Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling. Implementation of environmentally friendly waste management with a community-based 3R pattern in the form of a waste bank. On-site handling or handling of waste at the source is the treatment of waste that still has economic value, which is carried out before the waste reaches the landfill. This management will be faced with the problem of limited facilities and infrastructure and the undeveloped structure, management and human resources. Waste management by community groups has begun to develop but has not been significant in terms of scope and scale of services. From several community groups managing the Waste Bank, there are only a few groups that are active and the surrounding community can already feel the benefits. This research is a descriptive and qualitative research, relying on primary and secondary data collection. Data analysis refers to regulations related to solid waste. Conclusions are drawn in a deductive way. The results of the analysis show that through a participatory approach, the community is able to identify, analyze and map their own problems, potentials, threats, and obstacles to the waste problem, as well as find solutions to the waste problem. In managing waste, the community able to organize themselves in joint activities to solve waste problems, as a form of high awareness in responding to waste problems and acting on the basis of common interest.*

*Keywords: implementation, waste bank, structure, management, resources.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras ditengah-tengah kesibukan bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang”**. Penulisan Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Magister Ilmu Administrasi Publik Program Strata Dua (S-2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam proses perkuliahan sampai dengan tahap penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam tesis ini, tidak luput dari berbagai kendala, salah satunya adalah dengan adanya kondisi wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa pembatasan kegiatan. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2021 untuk menangani pandemi covid-19, sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor termasuk yang penulis alami dalam kegiatan perkuliahan sampai dengan penelitian tesis ini. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara online sebagai tindak lanjut aturan PPKM tersebut, merupakan salah satu jalan agar kegiatan perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Namun penulis merasakan hasil yang diterima kurang begitu maksimal jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka langsung, baik pada saat perkuliahan maupun dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi tesis ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Berbagai permasalahan serta kendala yang muncul dalam penelitian dan penyusunan tesis ini dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan

dukungan yang tidak terhingga dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suparno, Msi selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang sudah menerima penulis sebagai mahasiswa Magister Administrasi Publik.
2. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan kesempatan penulisan tesis ini, sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan tesis ini.
3. Dr. Tri Lestari Hadiati. M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan semangat dalam proses perkuliahan di Magister Ilmu Administrasi Publik.
4. Dr. Indra Kertati, M.Si dan Drs. Harsoyo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran serta selalu mengingatkan batas waktu dalam menyelesaikan laporan tesis ini.
5. Pemerintah Kecamatan Candisari Kota Semarang dan Kelurahan sekecamatan Candisari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Candisari.
6. Bapak Ibu Dosen dan para Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah membantu dalam proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis.
7. Para pengelola bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari yang sudah menerima kegiatan penelitian yang penulis lakukan, dengan memberikan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
8. Keluargaku tercinta, istri, anak, menantu dan cucu yang telah memberikan dukungan yang tidak terhingga, sehingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas  
17 Agustus 1945 Semarang.

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Semarang, Maret 2022



CIPTA NUGRAHA  
NPM.191003631010386

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. KERANGKA TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	15
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Fokus Penelitian .....	36
B. Jenis dan Desain Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Lokasi Penelitian .....	38

3. Jenis Data .....	39
4. Sumber Data .....	39
5. Teknik Pengumpulan Data .....	40
6. Teknik Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	61
C. Pembahasan.....	97
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Sederhana Proses Implementasi Strategi .....	16
Gambar 2. Kerangka Kerja Analisis Implementasi.....	33
Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Candisari .....	46
Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Candisari .....	51
Gambar 5. Struktur Organisasi Bank Sampah .....	99
Gambar 6. Contoh Hasil Kerajinan Daur Ulang Sampah.....	101

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Profil Pembagian Wilayah Kecamatan Candisari .....	45
Tabel 2. Tenaga Kebersihan Kecamatan Candisari .....	53
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah .....	54
Tabel 4. Daftar Bank Sampah Kecamatan Candisari.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Instrumen Instrumen Untuk Aparat Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan.....	128
2. Instrumen Instrumen Untuk Pengelola Bank Sampah .....	135
3. Instrumen Untuk Pekerja di Bank Sampah .....	142
4. Instrumen Ketua RT Dan RW di Wilayah Kecamatan Candisari.....	143
5. Dokumentasi Penelitian .....	144

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat karena dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi dan kegiatan lainnya oleh manusia dapat mengandung bahan pencemar yang memiliki pengaruh terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut Soemirat (2004)<sup>1</sup>, faktor-faktor yang mempengaruhi sampah adalah:

#### 1. Jumlah Penduduk

Hal tersebut dapat dipahami dengan mudah, bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula jumlah sampahnya. Pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

#### 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah per kapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi pun bertambah, produk pertanian, industri dan lain-lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

---

<sup>1</sup>Soemirat. (2000). *Kesehatan Lingkungan*. Bandung. Universitas Gadjah Mada University Press

### 3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufakturpun semakin beragam pula .

Menurut Gelbert dkk dalam (Faizah, 2008)<sup>2</sup>, Dampak negatif yang ditimbulkan sampah antara lain :

- a. Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- b. Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- c. Dampak terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata serta bencana.

Menurut Sudrajat (2006)<sup>3</sup>, sampah menjadi masalah penting untuk kota yang padat penduduknya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Volume sampah sangat besar, sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir atau TPA.
- b. Lahan TPA semakin sempit karena tergeser penggunaan lain.

---

<sup>2</sup>Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Tesis. Semarang:Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

<sup>3</sup>Sudrajat, HR. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penerbit Swadaya

- c. Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, sehingga sampah lambat membusuknya. Hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah lebih besar dari pembusukannya. Oleh karena itu, selalu diperlukan perluasan areal TPA baru.
- d. Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena berbagai pertimbangan.
- e. Manajemen pengelolaan sampah tidak efektif sehingga sering kali menjadi penyebab distorsi dengan masyarakat setempat.
- f. Pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan.
- g. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah sehingga menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di TPA.

Berdasarkan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Namun laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan, ini karena program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan cukup berhasil, namun hal tersebut tidak mengurangi produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Semarang. Sehingga permasalahan sampah tidak bisa disepelekan begitu saja.

Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Bab I Pasal I ; dinyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Persoalan sampah di Kota Semarang semakin

mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan penanganan secara serius. Ini dikarenakan lahan tempat pembuangan akhir di TPA Jatibarang semakin sempit dan sudah mulai penuh. Bahkan volume sampah yang dibuang ke tempat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu naik sekitar 10 persen. Daerah tengah kota masih menjadi penyumbang sampah terbesar, terlebih saat musim penghujan, volume sampah meningkat hingga 30 persen dibandingkan pada saat musim kemarau.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Berdasar Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tugas pengelolaan sampah Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Pemerintahan di Kecamatan Candisari terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

- e. Memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar skpd, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Untuk menyeleggarakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Pemerintahan di Kecamatan Candisari diberi wewenang sesuai pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna tpa dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah tpa ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Bidang Ilmu Administrasi Negara, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana tugas pengelolaan sampah khususnya butir a pasal 6

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yaitu “menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah” itu berhasil diimplementasikan oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari Kota Semarang. Oleh sebab itu, sebagai upaya mengetahui dan menjelaskan lebih jauh tentang pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah sebagai wujud kesadaran masyarakat di wilayah Pemerintah Kecamatan Candisari, Kota Semarang, maka dalam tesis ini diajukan judul : **“Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang”**.

## **B. Permasalahan**

Mengacu pada Nugroho (2003)<sup>4</sup> analisis mengenai implementasi strategi terdiri atas analisis aspek Struktur, analisis aspek sistem, analisis aspek manusia dan analisis aspek budaya organisasi, namun karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian dalam penelitian ini analisis mengenai implementasi pengelolaan sampah dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat). Hal ini disebabkan karena analisis aspek struktur, manusia (masyarakat) dan sistem adalah yang paling erat hubungannya dengan Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan analisis aspek budaya organisasi tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 pasal 7 butir c pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain didalam

---

<sup>4</sup>Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo

menjalankan tugas-tugas pengelolaan sampah. Oleh sebab itu implementasi pengelolaan sampah pada penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini Bank sampah yang ada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi pengelolaan sampah oleh bank sampah di wilayah Kecamatan Candisari?”**

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian sangat penting artinya untuk menentukan kemana arah penelitian ini akan dituju. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengelolaan sampah oleh Bank Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis seperti yang diuraikan berikut ini. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang khususnya Kecamatan Candisari dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan tujuan menciptakan Kota yang bersih, indah dan nyaman. Selain itu juga berguna bagi masyarakat secara umum dalam menerapkan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah.

Kegunaan teoritis berarti manfaat hasil penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan

dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep mengenai pelayanan Publik,  
khususnya ilmu pengetahuan tentang implementasi strategi pengelolaan sampah.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) yang ditulis oleh Faizah<sup>5</sup>, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta khususnya masyarakat di Gondolayu Lor sudah berjalan secara baik dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPSS hingga 70%. Model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3R merupakan solusi paradigmatik. Problematika utama dalam pelaksanaan model ini adalah bagaimana mengubah paradigma “membuang sampah” jadi “memanfaatkan sampah”. Problematika lain yang teridentifikasi adalah : (a) pemerintah daerah belum memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah; (b) tidak ada mekanisme dan person yang memantau dan mengevaluasi kegiatan; (c) penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R tidak diikuti penyediaan sarana dan prasarana penunjang; (d) pemilahan sampah di rumah tangga kurang tuntas; (e) tidak ada kaderisasi untuk mencari pengurus baru yang memiliki kapabilitas dan integritas
2. Penelitian tentang Pengelolaan Bank sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (studi pada Bank

---

<sup>5</sup>Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

sampah Kota Malang) yang ditulis oleh Mochamad Mukhlis<sup>6</sup>, menunjukkan bahwa dengan berdirinya Bank Sampah Malang (BSM) muncul industri kreatif, kerajinan tangan yang berbahan dari daur ulang sampah. BSM berdiri sebagai pionir kemudian membentuk unit-unit ang tiap unit tersebut bekerjasama dengan pengepul dan bahkan dengan pemulung. Sehingga pola pembinaan BSM ini unik, terjadi sinergi satu dengan yang lain. BSM sebagai pembina sementara unit dan pengepul sebagai anggota binaan. Di BSM dikembangkan model pengelolaan sampahnya dari pengklasifikasian 70 jenis sampah menjadi 100 jenis sampah. Program pemberdayaan yang dilakukan adalah ada 3 kategori yaitu : program pelayanan simpanan, pembiayaan atau modal usaha tanpa bunga, dan program pelatihan pengelolaan sampah menjadi usaha kreatif.

3. Penelitian tentang Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sekaran Kota Semarang yang ditulis oleh Oktyaan Praditya<sup>7</sup>, menunjukkan bahwa Produksi sampah rumah tangga setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: aspek teknik operasional pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan tempat pembuangan sementara) dapat dijelaskan bahwa sistem pewadahan sampah yang digunakan adalah pola individual, pola pengumpulan sampah adalah sistem pengumpulan individual, pengangkutan sampah bersifat komunal, dan sampah hanya bermuara di

---

<sup>6</sup>etheses.uin-malang.ac.id/13363/1/15801010.pdf

<sup>7</sup> <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/3046>

tempat pembuangan sementara. Aspek kelembagaan, aspek hukum dan peraturan, dan aspek peran serta masyarakat masih belum ada secara resmi di Kelurahan Sekaran. Hanya aspek pembiayaan yang sudah berjalan. Saranyang diberikan kepada pihak masyarakat adalah peran serta dalam pengelolaan sampah ditingkatkan. Saran bagi pihak-pihak terkait agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam upaya menurunkan volume sampah dan mengelola sampah di Kelurahan Sekaran Kota Semarang.

4. Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Studi pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo. Yogyakarta yang ditulis oleh Mahbubun MS<sup>8</sup>, menunjukkan bahwa ada tiga hal dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Sinar lestari yaitu : tahap penyadaran berupa sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan tentang bank sampah, tahap pembekalan ketrampilan, dengan daur ulang sampah plastik dan daur ulang botol bekas dan tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam prosespenyadaran dan pembekalan ketrampilan. Sedangkan dampak positif adanya bank sampah yaitu : dampak sosial, terjalinnya silaturahmi antara warga satu dengan warga yang lainnya, dampak ekonomi, adanya peningkatan ekonomi dari nasabah bank sampah dan dampak lingkungan, menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman.
5. Penelitian tentang Hubungan Persepsi Ibu Rumah Tangga Tentang bank Sampah Dengan partisipasi Pengelolaan Bank Sampah Gawe Rukun Kota

---

<sup>8</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/25114/>

tangerang yang ditulis oleh Eka Putri Azrai, Ernawati, Santi Rizkiani<sup>9</sup>, menunjukkan bahwa peran serta pengelola bank sampah adalah keterlibatan fisik, mental, dan emosional seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, berkontribusi, dan bertanggung jawab untuk kelompok itu Tujuannya, dalam hal ini kegiatan pengelolaan bank sampah. Salah satu faktornya yaitu Partisipasi dalam pengelolaan Bank Sampah Gawe Rukun berpengaruh terhadap persepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan ibu rumah tangga persepsi tentang bank sampah dan partisipasi Bank Sampah 'Gawe Rukun' pengelolaan. Penelitian ini dilaksanakan di RW 01 Kelurahan Kunciran Indah Tangerang Kota pada bulan April sampai Mei 2016. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan korelasional belajar. Sampel penelitian 151 ibu rumah tangga dipilih dengan menggunakan metode sederhana pengambilan sampel acak. Uji prasyarat menunjukkan bahwa data normal dan homogen. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier dan korelasi sederhana. Model regresi diperoleh  $\hat{Y} = 92,511 + 0,737X$  memiliki hubungan yang signifikan dan linier. Koefisien Korelasi yang diperoleh sebesar 0,7502 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara persepsi ibu rumah tangga tentang bank sampah dan partisipasi 'Gawe Rukun' Pengelolaan Bank Sampah. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,5628 yang mana Artinya, persepsi ibu rumah tangga tentang bank

---

<sup>9</sup><http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/biosfer/article/view/5570>

sampah memberikan kontribusi sebesar 56,28% terhadap partisipasi pengelolaan Bank Sampah 'Gawe Rukun'.

6. Penelitian tentang Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir Rt: 02 Rw: 09) Bojongsari Kota Depok yang ditulis oleh Jean Anggraini<sup>10</sup> menunjukkan bahwa berawal atas keprihatinan masyarakat sekitar terhadap sampah-sampah disekitar Rt: 02 ini, dimana tingginya angka peningkatan penyakit diare, sampah-sampah sebelumnya berserakan dimana-mana, sampahnya hanya dibakar saja pada pembuangan akhir, dan tidak ada pengelolaan sampah di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Cempaka II berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir RT: 02 RW: 09 Bojongsari Kota Depok. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pengelolaan sampah tersebut lingkungan mereka lebih terlihat bersih dan rapih, warga lebih bersadar diri atas sampah-sampah yang ada disekeliling mereka, dan hasil dari penjualan sampah tersebut bisa membantu mereka dalam kebutuhan mereka walaupun tidak seberapa dalam penghasilanya.
7. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten tana Tidung yang ditulis oleh Paramita

---

<sup>10</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34387/1/JEAN%20ANGGRAINI-FDK.pdf>

Adhinul Putera<sup>11</sup> menunjukkan bahwa peningkatan jumlah volume sampah di kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang ditimbulkan. Mengingat pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran Pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan di realisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Pada aspek Organisasi, Pemda kabupaten Tana Tidung harus segera menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Pada aspek Interpretasi, Dinas Pekerjaan Umum perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pada Aspek Aplikasi, Pemerintah perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai standar kriteria menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.

8. Penelitian tentang Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolam yang ditulis oleh Ismail Putra Munthe<sup>12</sup> menunjukkan bahwa alah satu persoalan lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan yakni masalah sampah, karena yang namanya sampah pada umunya segala sesuatu yang langsung dibuang dan dibakar. Salah satu metode pengelolaan sampah adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan salah satu bentuk penanganan sampah berbasis

---

<sup>11</sup><http://repository.ut.ac.id/7611/>

<sup>12</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/5470/1/ISMAIL%20PUTRA%20MUNTHE.pdf>

masyarakat melalui pendirian bank sampah. Hasil penelitian sistem pengelolaan yang dilakukan oleh bank sampah di Desa Kolam, sebagai berikut: Pertama, pemilahan sampah, kedua, pendataan pertama dan pengangkutan, ketiga, dikumpulkan ke bank sampah, keempat, sampah dipilah sesuai jenis dan didata ulang, kelima, pengolahan, keenam, penjualan dan pencairan uang nasabah. Kontribusi bank sampah terhadap pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu: Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekologi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan terhadap penelitian ini yaitu fokus terhadap pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah lokus di wilayah Pemerintahan kecamatan Candisari Kota Semarang. Fokus pada sistem pengelolaan bank sampah yang dilaksanakan oleh kelompok warga masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Implementasi**

Grindle dalam Wibawa (1994 : 10)<sup>13</sup> menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle dalam Wibawa (1994 : 3) menambahkan bahwa “proses implementasi baru akan

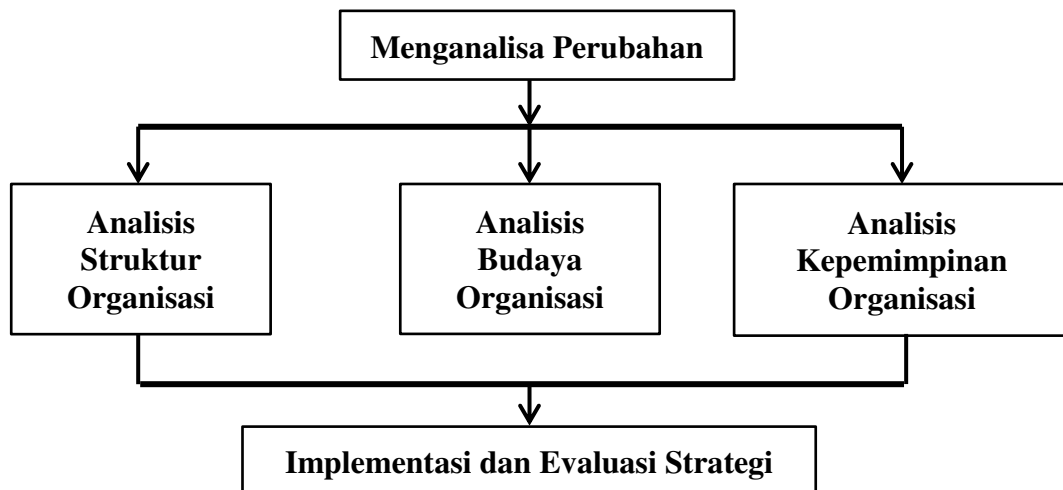
---

<sup>13</sup> Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta

dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994 : 11) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policystakeholders*).

Lain halnya dengan pandangan Certo dan Peter dalam Setiawan dan Zulkieflimansyah (2007:103)<sup>14</sup> bahwa untuk melakukan implementasi strategi yang baik, tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses tersebut adalah seperti gambar 2 berikut :



Gambar 1 . Model Sederhana Proses Implementasi Strategi

(Zulkieflimansyah, 2007)

---

<sup>14</sup> Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. *Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)*., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mengacu pada Hunger dan Wheelen (2003 :1)<sup>15</sup> implementasi strategi dalam organisasi terdiri atas program, anggaran dan prosedur. Penjelasan dari masing-masing implementasi disajikan di bawah ini.

a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi organisasi, budaya internal organisasi, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Menurut Bryson dalam Crown (2004:133)<sup>16</sup> pengembangan program dapat berjalan setelah menetapkan alternatif strategi yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Program harus menjadi proses yang kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan kemungkinan atau alternatif yang ditentukan. Program yang ditentukan harus merepresentasikan penggunaan kemungkinan sumber daya terbaik dari berbagai sumber daya yang mungkin digunakan.

Sedangkan dalam Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwas BPKP (2007:34)<sup>17</sup> dijelaskan bahwa “program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat terkait dengan kebijakan instansi. Oleh karena itu, kebijakan

---

<sup>15</sup> Hunger dan Wheelen, 2003. *Manajemen Strategis*., Yogyakarta., Penerbit Andi

<sup>16</sup> Crown Dirgantoro., 2004., *Manajemen Stratejik*., Jakarta., Grasindo

<sup>17</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi kelima Tahun 2007

yang ditetapkan harus dikaji dahulu apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Agar program dapat dilaksanakan secara realistis, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Program dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah.
- 2) Analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan (atau hubungan) antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan dengan program. Pimpinan harus mengupayakan suatu keterkaitan yang menimbulkan keseimbangan antara program-program yang bersangkutan.
- 3) Koordinasi atas program. Tidak perlu secara menyeluruh, akan tetapi cukup dilakukan terhadap program kerja yang memang penting saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kondisi pengendalian yang terlalu ketat dan mengurangi kebebasan dan motivasi pegawai.
- 4) Penyusunan program hendaknya cukup sederhana.
- 5) Setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan mengajukan program dari masing-masing unit.
- 6) Harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja hanya merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau, akan tetapi yang lebih penting adalah yang berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut Grindle dalam Sistaningrum (2010 :167)<sup>18</sup> menyatakan bahwa “suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek”, sehingga beliau memberikan pernyataan *Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect*”. Menurut Terry dalam Sistaningrum (2010:167) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran”.

Selanjutnya, Grindle dalam Sistaningrum (2010:168) menjelaskan bahwaisi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources commited*)”. Berdasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa program sesungguhnya berisi antara lain : struktur organisasi (susunan personalia), Pelaksana Program/staf, sumber daya (sarana prasarana).

#### b. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat

---

<sup>18</sup> Sistaningrum., 2010, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Struktur Penguasaan tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani.*, Graha Ilmu, Yogyakarta

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi. Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:105)<sup>19</sup> bahwa anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kognitif dan biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap pimpinan disetiap lini.

Ditambahkan pula bahwa oleh Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:107)<sup>20</sup> fungsi anggaran adalah :

1) Fungsi perencanaan

Perencanaan dibutuhkan dalam kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Dalam rangka mencapai tujuan harus diikuti oleh penyusunan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban sehingga berfungsi sebagai alat perencana dalam pengimplementasian/menjalankan kegiatan/program organisasi.

---

<sup>19</sup>Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. *Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)*., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

<sup>20</sup>Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. *Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)*., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

2) Fungsi Koordinasi

Rencana dan tindakan berbagai pusat pertanggungjawaban dalam organisasi perlu diorganisasikan, dalam hal ini anggaran mempunyai fungsi mengkoordinasikan berbagai pusat pertanggungjawaban agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan organisasi.

3) Fungsi Komunikasi

Organisasi harus menentukan saluran komunikasi melalui unit-unit dalam organisasi jika ingin efisien. Komunikasi ini berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, pelaksanaan bahkan penyimpangan yang timbul. Dalam hal ini dalam penyusunan ataupun penyaluran anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, selanjutnya bertanggungjawab terhadap anggaran tersebut melalui laporan secara periodik.

4) Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi pimpinan untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Anggaran dalam penyusunannya melibatkan peran serta para pelaksana dan dapat digunakan sebagai memotivasi mereka dalam melaksanakan program/rencana kegiatan dalam mencapai tujuan dan juga dalam rangka mengukur kinerja pelaksana/pegawai

5) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi

Anggaran dapat dijadikan sebagai perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan/pengimplementasian sehingga dapat ditentukan ada tidaknya penyimpangan yang timbul.

6) Fungsi Pendidikan

Dalam hal ini anggaran menjadi alat bagi pimpinan untuk bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban pada SKPD yang dipimpinnya sekaligus dengan SKPD lainnya dalam naungan organisasi.

Simon dalam Widodo (2000:17)<sup>21</sup> mengatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja atau tindakan/implementasi suatu unit organisasi yang menghasilkan atau menggunakan sumber daya, sehingga mengacu dari hal tersebut sasaran proses penganggaran adalah :

- 1) Merubah strategis organisasi menjadi tindakan untuk menciptakan nilai.
- 2) Mengevaluasi apakah sumber daya memadai untuk menerapkan program yang telah disetujui sebelumnya.
- 3) Menciptakan sebuah pondasi untuk meningkatkan efisiensi dengan indikator utama penerapan strategi, apakah tujuan sesuai dengan ukuran-ukuran masukan, proses dan keluaran mendukung suksesnya penerapan tersebut.

---

<sup>21</sup>Widodo, *Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik*, Jurnal Administrasi Negara-volume iii\vol.iii, no.1, 2000

### c. Prosedur

Paradigma *governance* membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Penerapan prinsip *corporate governance* juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah – langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa penggunapengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, prosedur berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Sehingga secara umum, prosedur merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. (Tjipto Atmoko).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><http://resources.unpad.ac.id/>

Edward III dalam Widodo (2000: 18)<sup>23</sup> menyatakan Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Prosedur dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Prosedur yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Prosedur sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam caracara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas prosedur menghambat implementasi.

Menurut Waller dalam Widodo (2000 : 19), „tugas prosedur adalah memastikan bahwa di seluruh organisasi semua orang mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dan bekerja sebagaimana semua orang bekerja“. Prosedur juga bukanlah uraian pekerjaan. Prosedur harus mengungkapkan : bagaimana semua aktivitas manajemen dilaksanakan, siapa yang akan

---

<sup>23</sup>Widodo, *Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik, Jurnal Administrasi Negara-volume iii\vol.iii, no.1, 2000*

melaksanakan aktivitas, bagaimana aktivitas didokumentasikan dan instruksi tempat kerja yang diperlukan untuk referensi.

## **2. Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah**

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah padat berdasarkan asalnya dibedakan menjadi yaitu :

- a. Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah busuk atau sampah yang terdegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable dan berasal dari bahan hayati yang dengan mudah dapat terurai secara alami dengan tanah. Jenis sampah ini sebagian besar terdapat pada sampah rumah tangga pada sisa sayur mayur, buah-buahan, makanan, lauk-pauk, dan lain sebagainya. Selain itu sampah organik ini juga terdapat pada sampah tanaman hijau seperti daun-daunan, rumput dan lain sebagainya. Serta pada` organik hewan yang dimakan seperti telur, ikan, udang dan sejenisnya.
- b. Sampah An-organik, yaitu sampah pada prosuk sintetis maupun hasil proses pengolahan bahan tambang dari bahan-bahan non-hayati. Sampah an-organik sebagian besar terdapat pada kebutuhan manusia pada semua produk plastik, logam, botol, kaca dan kertas. Pada sebagian besar sampah

an-organik ini sulit terurai oleh mikroorganisme atau alam sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Pengelolaan sampah yang dilakukan pada suatu daerah akan mempengaruhi kualitas lingkungan pada daerah tersebut meskipun dampaknya tidak kentara secara langsung. Permasalahan dalam sampah perkotaan timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sistem pengumpulan yang tidak tuntas, kurangnya alat angkut sampah, dan terbatasnya kapasitas tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi permasalahan yang khas mencakup aspek teknis, sosial, dan budaya.

Kota Semarang dalam mengelola sampah dilakukan secara konvensional, yaitu sampah rumah tangga di buang ke tong sampah di depan rumah kemudian ada mobil atau motor sampah yang mengambilnya. Kemudian mobil sampah tersebut meletakkannya di tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Setelah di TPS ada truk sampah yang mengambil sampah tersebut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Menurut undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Mengacu pada pernyataan undang-undang bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah maka harus segera diterapkan pengelolaan sampah yang terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan melakukan

reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu bisa dilakukan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan disini harus lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah yang efisien itu dapat mengurangi timbulan sampah dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari sumber timbulan yaitu rumah tangga. Hal itu memang perlu kesadaran dari masyarakat. Jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka timbulan sampah bisa dikurangi.

Tugas dan wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012, Bab IV, pasal 5 sampai dengan 7 sebagai berikut :

a. Pasal 5

“Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini”.

b. Pasal 6

“Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ;
- 2) melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;

- 3) memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 5) memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- 6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- 7) melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; “

c. Pasal 7 Ayat (1)

“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- 4) menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup; dan
- 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya”.

Dalam hal pengelolaan sampah seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 khususnya butir a pasal 6 yaitu “menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah” telah berhasil diimplementasikan oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari Kota Semarang. Bukti keberhasilan ini adalah dengan mulai berdirinya beberapa bank sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan.

Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan

sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomi. Proses berdiri dan berjalannya Bank Sampah memang ada faktor-faktor yang mendorongnya yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang ada di wilayah masing-masing.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan

dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

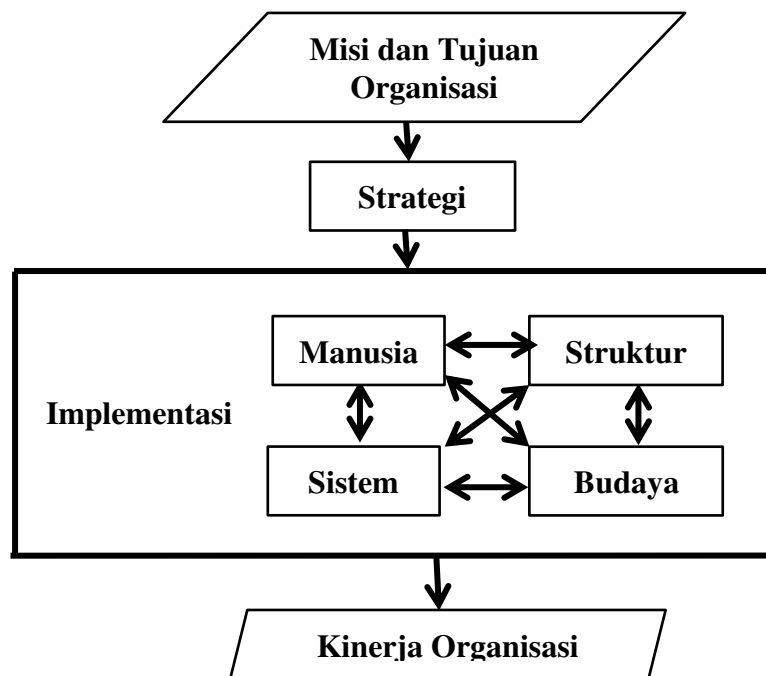
Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Dalam hal partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### C. Kerangka Pikir Penelitian

Mengacu pada Nugroho (2003)<sup>24</sup> menggambarkan Kerangka Kerja Analisis Organisasi Untuk Implementasi Strategi seperti berikut:



Gambar 2. Kerangka Kerja Analisis Implementasi (Nugroho, 2003)

<sup>24</sup>Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo

Selanjutnya Nugraha (2003) menjelaskan Kerangka Kerja Analisis Organisasi Untuk Implementasi Strategi terdiri atas :

a. Analisis Aspek Struktur

- 1) Bagaimana struktur organisasinya?
- 2) Bagaimana garis kekuasaan dan komunikasinya?
- 3) Apa peran dari satuan tugas, komite atau apa kesamaan mekanismenya?

b. Analisis Aspek Sistem

- 1) Bagaimana perangkat anggarannya?
- 2) Bagaimana kebiasaan sistem perencanaannya?
- 3) Apa yang menjadi kunci pengukuran yang digunakan untuk evaluasi kinerja?
- 4) Bagaimana sistem akuntansinya?
- 5) Bagaimana jalannya aliran produk dan informasinya?

c. Analisis Aspek Manusia

- 1) Apa yang menjadi keahlian (skill), pengetahuan, dan pengalaman dari pekerja?
- 2) Bagaimana kondisinya menurut departemen dan kualitas-nya?
- 3) Apa yang menjadi harapan pekerja?
- 4) Bagaimana sikap dalam menghadapi perusahaan dan pekerjaannya?

d. Analisis Aspek Budaya Organisasi

- 1) Apakah nilai-nilai yang ada visible dan diterima?
- 2) Nilai-nilai apa yang ada dan bagaimana hal itu dikomunikasikan?

- 3) Apa yang menjadi norma tingkah laku?
- 4) Apa saja yang dijadikan simbol dan aktivitas simbolik-nya?
- 5) Gaya manajemen apa yang dominan?
- 6) Bagaimana cara penyelesaian konflik?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian (Moleong, 2005). Fokus Ilmu Administrasi Negara yang dianggap penting untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan sampah oleh Bank Sampah yang dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat). Mengacu pada Nugraha (2003)<sup>25</sup> analisis mengenai implementasi strategi terdiri atas Analisis aspek Struktur, Analisis aspek Sistem, Analisis Aspek Manusia dan Analisis Aspek Budaya organisasi. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian dalam penelitian ini analisis mengenai implementasi pengelolaan sampah dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat). Hal ini disebabkan karena analisis aspek struktur, manusia (masyarakat) dan sistem adalah yang paling erat hubungannya dengan Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan analisis aspek budaya organisasi tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah terbentuk dan berjalannya Bank Sampah selain menimbulkan dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dapat

---

<sup>25</sup> Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo

mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA dan dampak negatifnya yaitu dapat mengurangi penghasilan pasukan kuning, pemulung dan tukang rombeng.

Setelah terbentuk dan berjalannya Bank Sampah ada kendala-kendala yang terjadi antara lain tidak semua masyarakat dapat memilah sampah dengan benar dan tidak semua masyarakat mempunyai tempat penyimpanan atau gudang serta terjadinya sebuah permasalahan pengambilan di waktu musim penghujan serta terjadinya harga sampah kering yang tidak stabil.

Jadi fokus penelitian ini adalah pembahasan penting mengenai implementasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari ditinjau dari analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat).

## **B. Jenis dan Desain Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam bidang ilmu Ilmu Sosial, kategori Ilmu Sosial Administrasi Negara. Tipe penelitian ini yaitu : penelitian lapangan diskriptif kualitatif. Penelitian Diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007)<sup>26</sup>. Dalam

---

<sup>26</sup>Moleong, Lexy J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya

Penelitian Lapangan Deskriptif, hasil pengamatan di lapangan digunakan untuk mendeskripsikan tentang fenomena sosial yang terjadi.

## 2. Lokasi Penelitian

Mengacu pada Moleong (2005)<sup>27</sup>, lokus penelitian adalah tempat ilmu yang menggambarkan dimana penelitian tersebut berada. Penelitian ini merupakan penelitian dalam rangka meningkatkan keilmuan di bidang ilmu Administrasi Negara. Secara umum lokus dari Ilmu Administrasi Negara adalah kepentingan pemerintahan (*government interest*) dan urusan pemerintahan (*government affair*). Untuk membatasi penelitian ini Lokus Penelitian yang di pilih yaitu urusan pemerintahan (*government affair*) pada pemerintahan di tingkat Kecamatan. Pemerintahan Kecamatan yang dipilih yaitu Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari dipilih sebagai lokus penelitian disebabkan karena pada wilayah pemerintahan ini, terdapat berbagai sumber sampah yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengelolanya bersama-sama dengan stakeholder yang ada terutama warga masyarakat. Berbagai sumber sampah tersebut antara lain yaitu sampah dari pasar, sampah dari pusat keramaian (mall/pertokoan), sampah rumah tangga, sampah dari lembaga pendidikan dan perkantoran dan sampah dari rumah sakit yang semuanya itu ada di Kecamatan Candisari.

---

<sup>27</sup>Moleong, Lexy J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya

### **3. Jenis Data**

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan. Data primer dalam penelitian ini antara lain yaitu:
  - 1) Hasil pengamatan mengenai prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank Sampah di wilayah pemerintahan Kecamatan Candisari Kota Semarang.
  - 2) Hasil pengamatan mengenai prosedur administrasi dan pelaksanaan pengelolaan persampahan oleh Bank sampah di Wilayah Kecamatan Candisari.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pengamatan. Data skunder dalam penelitian ini antara lain yaitu :
  - 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
  - 2) Data sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Candisari.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian yang didapat dari berbagai sumber meliputi : Peraturan perundang undangan, Surat keputusan, catatan, arsip, foto dan dolumen –dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan perasampahan oleh bank sampah yang ada di wilayah kecamatan Candisari.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah dengan wawancara dibantu dengan kuesioner, observasi dan studi kepustakaan. Penjelasan masing-masing metode seperti dibawah ini :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

### b. Observasi atau Pengamatan Langsung

Merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Tipe observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung di daerah yang bersangkutan yaitu untuk melihat pengelolaan sampah oleh Bank Sampah yang ada di Kecamatan Candisari.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari: buku, jurnal, serta laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Ketiga metode di atas dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui

pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Aparat Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Candisari dan Kota Semarang.
- b. Beberapa Ketua RT dan RW di Wilayah Kecamatan Candisari.
- c. Pengurus Bank Sampah yang bertugas dalam pengelolaan sampah.
- d. Beberapa anggota masyarakat yang berkecimpung di bidang persampahan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai lembaga (Instansi) yang terkait dengan persampahan di Kota Semarang khususnya Kecamatan Candisari, melalui wawancara dengan petugas yang berwenang, penelusuran dokumen, dan studi literatur kepustakaan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan dasar teori tertentu.

Analisis deskriptif dapat digunakan pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Walaupun dapat digunakan pada kedua jenis penelitian tersebut namun cara penerapannya pun tetap berbeda karena jenis datanya sudah beda dan tidak bisa jika diperlakukan dengan cara analisis yang sama.

Sebagai contoh, pada penelitian kuantitatif analisis data deskriptif biasanya menggunakan statistika deskriptif sehingga dapat menampilkan nilai mean, modus, median, maksimum, minimum, dll. Sedangkan pada penelitian kualitatif teknik analisis data deskriptif yang diterapkan adalah menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi.

Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan” Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Komponen dan analisis data ini adalah :

- a. Reduksi data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- b. Penyajian data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Verifikasi atau penyimpulan data kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Pemerintahan Kecamatan Candisari

Kecamatan Candisari merupakan salah satu dari enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang yang mulai berdiri sejak tahun 1992. Sebagai dasar berdirinya Kantor Kecamatan Candisari yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Mengacu pada Monografi Kecamatan Candisari (2020)<sup>28</sup>, Kecamatan Candisari terletak di 7 1'36.736" Lintang Selatan 110 24'32.0445" Bujur Timur dengan luas wilayah adalah 654 Ha. Sebagian besar wilayah Kecamatan Candisari merupakan daerah perbukitan dan masuk dalam kawasan atas wilayah Kota Semarang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Banyumanik, dengan batas wilayah berupa jalan tol.

---

<sup>28</sup> *Monografi Kecamatan Candisari* tahun 2020

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Tembalang, dengan batas wilayah berupa jalan tol
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Semarang Selatan, dengan batas wilayah berupa jalan Tentara Pelajar dan jalan Sriwijaya.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Gajahmungkur, dengan batas wilayah berupa jalan Sultan Agung, Jalan Teuku Umar dan jalan Diponegoro.

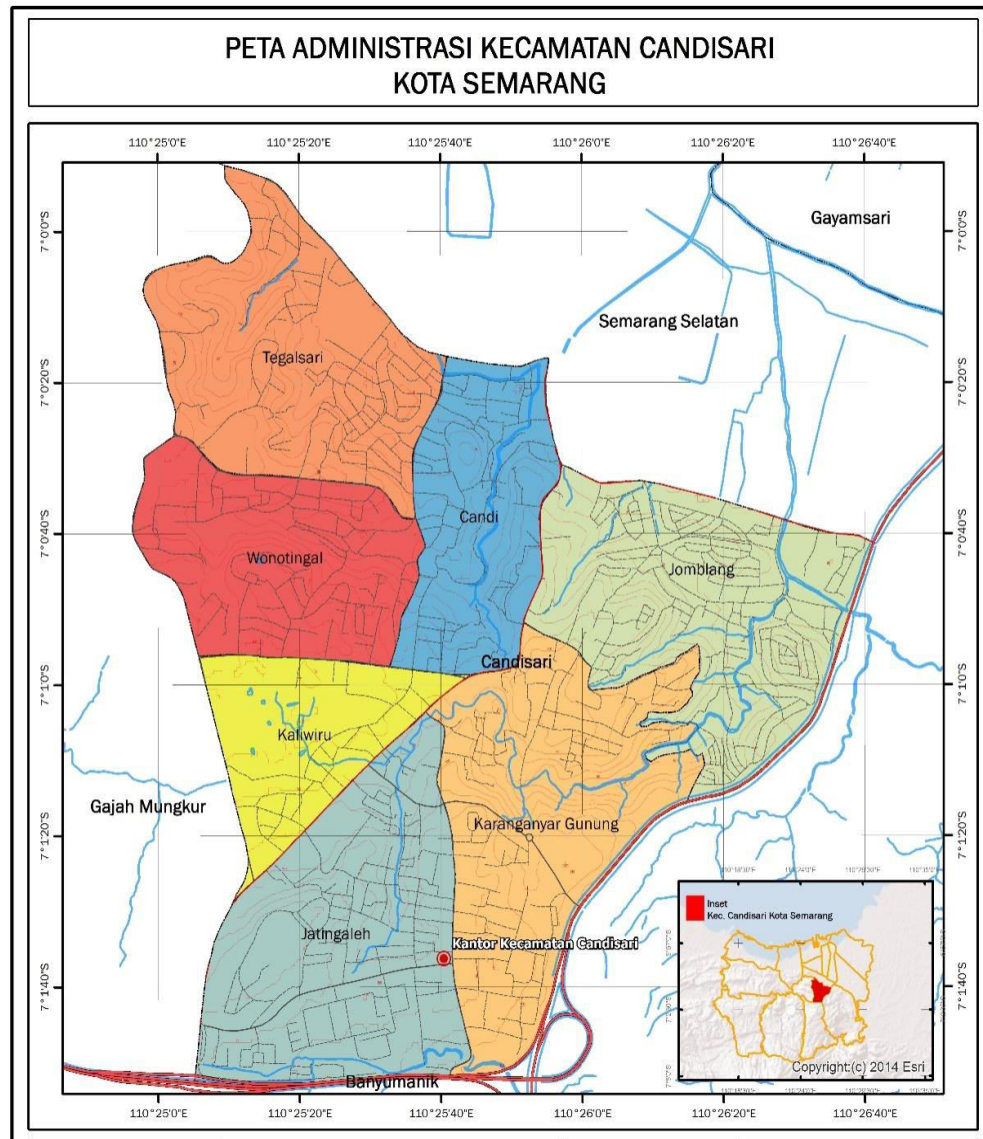
Kecamatan Candisari Kota Semarang dibagi menjadi 7 Kelurahan seperti tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. Profil Pembagian Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari

<b>KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH</b>		
	<b>RW</b>	<b>RT</b>	<b>PENDUDUK</b>
1. Candi	11	68	11.737
2. Jatingaleh	10	58	11.971
3. Jomblang	15	120	20.418
4. Kaliwiru	4	23	3.250
5. Karanganyar Gunung	6	50	11.203
6. Tegalsari	13	95	13.771
7. Wonotingal	6	47	8.196
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>461</b>	<b>80.546</b>

Sumber : Arsip Kecamatan Candisari, 2020

Sebagai gambaran letak wilayah Kecamatan Candisari yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari  
(Sumber : Monografi Kecamatan Candisari, 2015)

Dari gambaran lokasi wilayah Kecamatan Candisari tersebut dapat dilihat sumber utama sampahnya berasal dari pemukiman, pasar atau pusat keramaian dan industri rumah tangga. Sampah dari pemukiman yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Candisari berasal dari 461 RT dengan jumlah penduduk 80.546 orang yang tersebar di 7 Kelurahan.

Sampah pasar berasal dari pasar, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan (supermarket). Di Kecamatan Candisari terdapat 3 pasar yaitu: (1) Pasar Jangli di Jalan Jangli Kel. Karanganyar Gunung, (2) Pasar Sisingamangaraja di Jalan Sisingamangaraja Kel. Candi, dan (3) Pasar Kagok di Jalan Kagok Kel. Wonotingal. Sedangkan sampah dari pusat keramaian yaitu di beberapa pasar swalayan, toko modern, Pedagang Kaki Lima, sekolah, hotel, rumah sakit dan sebagainya.

## **2. Struktur Organisasi, Tata Kelola dan Pelaksana Penanganan Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari**

Pemerintah Kecamatan Candisari yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang mempunyai visi : Semarang Kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera, yang selanjtnya dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
- c. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi kecamatan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan.
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- l. Pembinaan terhadap unit pelaksana eknis Instansi Pemerintah di wilayahnya.
- m. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Kecamatan.
- n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh walikota.
- o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

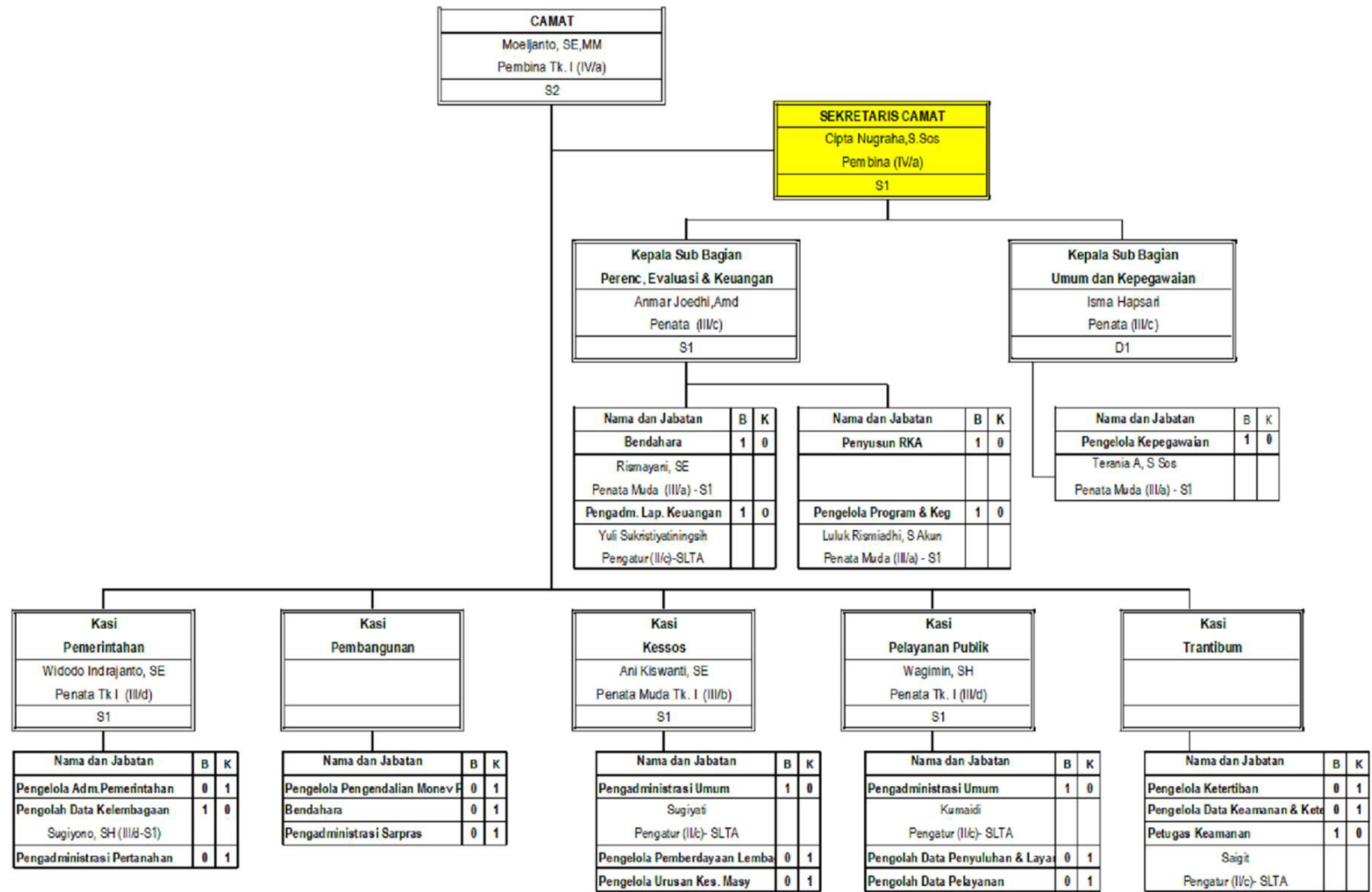
Guna mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan candisari mempunyai beberapa kewenangan antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan.
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.
- c. Menjalin koordinasi dengan Muspika, Dinas / Instansi terkait dan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat diwilayahnya.
- d. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.

- e. Melaksanakan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Struktur Organisasi Kecamatan Candisari seperti disajikan pada Gambar 4 di bawah ini:

**GAMBAR 4. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CANDISARI**



Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Penanganan sampah ini dimulai dengan pemilahan sampah organik dan non organik yang dipisahkan sesuai dengan fungsinya.

Secara umum tahapan pelaksanaan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Candisari di mulai dari sumber sampah yang berasal dari rumah tangga. Sampah yang ada di tiap rumah tangga dibuang ke dalam bak sampah yang ada di depan rumah masing-masing ataupun tempat tertentu yang sudah dipakai oleh warga masyarakat setempat. Selanjutnya sampah yang sudah terkumpul tersebut dibuang ke kontainer sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat, dengan cara dibuang sendiri ataupun diangkut oleh gerobak sampah. Untuk gerobak sampah operasionalnya menjadi tanggungjawab dari warga masyarakat yang dikelola oleh pihak RT / RW setempat.

Sedangkan pengangkutan sampah yang sudah di TPS menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan ini menggunakan armada truk kontainer ataupun dump truk yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPS sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang.

Petugas kebersihan yang ada di tingkat RT adalah merupakan pekerja lepas yang bekerja berdasarkan kesepakatan dari Pengurus RT dengan yang bersangkutan. Sedangkan petugas kebersihan yang bekerja sebagai pelaksana pengelola sampah pada Kantor Kecamatan Candisari merupakan para karyawan dengan status Non ASN, dengan seorang koordinator yang merupakan ASN staf kecamatan Candisari. Tugas utama para petugas ini adalah untuk melakukan penyisiran sampah di jalan protokol serta pembabatan rumput yang ada di jalan protokol wilayah Kecamatan Candisari.. Adapun petugas yang menangani urusan kebersihan di wilayah Kecamatan Candisari bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Tenaga Non ASN yang Menangani Kebersihan di Kecamatan Candisari

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas dalam jabatan</b>
1. Saigit	Staf Kecamatan	Koordinator kebersihan
2. Sunarno	Tenaga Kebersihan	Operator kendaraan roda 3
3. Heri Setiawan	Tenaga Kebersihan	Operator kendaraan roda 3
4. Eko Supriyanto	Tenaga Kebersihan	Operator kendaraan roda 3
5. Rusyanto	Tenaga Kebersihan	Operator kendaraan roda 3
6. Eko Janu P	Tenaga Kebersihan	Operator kendaraan roda 3
7. Sutris Hartono	Tenaga Kebersihan	Membersihkan sampah
8. Dwi Saryanto	Tenaga Kebersihan	Membersihkan sampah

Sumber : Hasil observasi Kantor Kecamatan Candisari, 2020

Berdasarkan data yang ada di kantor pemerintah Kecamatan Candisari diperoleh gambaran sarana dan Prasarana yang telah tersedia untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Candisari seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang tersedia di Kecamatan Candisari

No.	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Pengangkut Sampah	
a.	Truk Amrol pembawa kontainer sampah	4 buah
b.	Dump Truk pengangkut sampah	1 buah
c.	Kendaraan Roda tiga	4 buah
2	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	
a.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Umum	15 lokasi
b.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar	3 lokasi
3	Kontainer Sampah	23 buah
4	Mesin Babat rumput	6 buah

Sumber : Hasil observasi Kantor Kecamatan Candisari, 2020

### **3. Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Pengelolaan Sampah menurut Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini dilaksanakan mulai dari sumber sampah yang merupakan tempat asal timbulan sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir sampah.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas.

Jaminan Pemerintah tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana persampahan mulai dari penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA, yang sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Termasuk didalamnya Pemerintah wajib untuk melakukan perawatan serta penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

Guna mendukung program pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga pengelola persampahan. Lembaga ini dibentuk mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang masing-masing bertanggungjawab di wilayah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Adapun sebagai koordinator dapat dibentuk BLUD persampahan yang setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

BLUD persampahan ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana SKPD, yang dalam melaksanakan tugasnya disasarkan pada :

- a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan.
- c. Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan Badan Usaha dalam hal pengelolaan sampah. Pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan sampah Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha. Insentif diberikan bagi yang melakukan :

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- c. Pengurangan timbulan sampah.
- d. Tertib penanganan sampah.
- e. Sedangkan disinsentif diberikan kepada yang melakukan :
- f. Pelanggaran terhadap larangan.
- g. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pemberian insentif dan disinsentif ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda ini sudah diberlakukan, namun belum

semua komponen masyarakat melaksanakan. Penegakan atas pelanggaran perda selama ini juga masih lemah. Dampaknya sampah tetap menggunung.

#### **4. Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah ini tidak bisa terlepas dari seluruh rangkaian pengurangan dan penanganan dari mulai sumber sampah, pengurangan dan pemilahan dari sumber sampah, penanganan pengangkutan dari sumber sampah ke TPS, pengurangan dan pemilahan sampah di TPS, penanganan pengangkutan dari TPS ke TPA, dan pemrosesan sampai di TPA sendiri dengan sanitary landfill sesuai amanat dari UU nomor 18 tahun 2008.

Pengurangan sampah dengan 3 R (reduce, reuse, recycle) yaitu pada pengurangan sampah dengan pola mengurangi timbunan sampah, memanfaatkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dan daur ulang dari bahan baku sampah. Berikut dijelaskan tentang 3 R:

- a. Reduce / mengurangi / membatasi
  - 1) Gunakan produk yang memiliki kemasan minimal
  - 2) Gunakan produk isi ulang
  - 3) Gunakan gelas untuk menjamu
  - 4) Sistem prasmanan saat memperingati berbagai perayaan
- b. Reuse/ pemanfaat / pakai ulang
  - 1) Gunakan kain bekas untuk lap

- 2) Gunakan kaleng bekas untuk tempat menyimpan peralatan
  - 3) Gunakan kertas bolak-balik, kertas bekas untuk catatan
  - 4) Manfaatkan botol / gelas plastik untuk hiasan / kerajinan
  - 5) Simpan manfaatkan lagi kantong kresek untuk menyimpan barang
- c. Rycycle / daur ulang
- 1) Pembuatan kompos
  - 2) Pembuatan kertas daur ulang
  - 3) Gunakan produk daur ulang
  - 4) Serahkan/jual sampah plastik, kertas, kaleng, kepenggepul atau pemulung untuk didaur ulang.

Sebagai salah satu strategi mewujudkan penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat memunculkan ide pembentukan Bank Sampah. Ide dari pelaksanaan program Bank Sampah di Indonesia berasal dari masyarakat Bantul, tepatnya Dusun Badegan Yogyakarta. Program tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2008. Gagasan awal datang dari Bambang Suwerda dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Bank Sampah Bantul didirikan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak lingkungan yang berada di masyarakat Badegan. Pasca Gempa Bumi 26 Mei 2006 yang melanda Kota Bantul, banyak warga masyarakat Badegan yang terkena Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) yang disebabkan karena lingkungan yang tercemar.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1086-1095 | 1087(<http://banksampahbantul.or.id>).

Bank sampah adalah bank tempat menabung sampah. Dalam arti luasnya nasabah menabung sampah mereka dibank tersebut. Di tempat ini masyarakat menabung sampah dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Nasabah mendapatkan buku tabungan dan pada buku tabungan ini tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah nasabah tabung dan dapat ditarik dalam bentuk rupiah (uang). Bank sampah bekerja sama dengan pengepul barang-barang plastik, kerdus dan lain – lain untuk di rupiahkan dengan harga yang telah disepakati. Dan ada pula yang di olah menjadi pupuk, barang daur ulang, serta industri kreatif sehingga sampah bukan menjadi bencana sebaliknya menjadi berkah.

Adapun Bank Sampah yang sudah berdiri di wilayah Kecamatan Candisari sebanyak 18 buah. Surat Keputusan pendirian Bank Sampah dikeluarkan oleh Lurah setempat sebagai dasar pembentukan Bank Sampah. Namun saat dilaksanakan penelitian ini Bank Sampah yang masih aktif operasional di wilayah Kecamatan Candisari hanya berjumlah 13 Bank Sampah yang tersebar di beberapa wilayah Kelurahan se Kecamatan Candisari. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh situasi darurat pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya keterbatasan terhadap 5 Bank Sampah, sehingga saat ini tidak aktif operasional.

Secara terinci berikut ini daftar nama dan lokasi Bank Sampah yang saat ini masih aktif dan operasional meskipun dalam masa darurat pandemi Covid-19 di wilayah Kecamatan Candisari :

Tabel 4. Daftar Bank Sampah Kecamatan Candisari

<b>No</b>	<b>N A M A</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>KELURAHAN</b>
1	SUMBER REJEKI	Jl. Talang Candi Stoom RW 11	Candi
2	KATON RESIK	Jl. Tegal Wareng III/48	Candi
3	SEKAR CANDI	Jl. Jomblang Perbalan RT 01 RW 02	Candi
4	BERSIH BERKAH	Jl. Tegalsari Timur 1	Candi
5	MELATI	Jkl. Dr Wahidin no 110 RT 03 RW 08	Jatingaleh
6	SRIKANDI	Jl. Ksatrian K 48 RT 01 RW 07	Jatingaleh
7	RAFLESIA	RW 01	Jomblang
8	APL JOMBLANG	RW 14	Jomblang
9	MUGI BERKAH SARI	Genuk Krajan RW 04	Tegalsari
10	WARAS	Jl. Kagok Dalam 3 RT 01 RW 06	Wonotingal
11	NGUDI HAYUNING BAWONO	RW 02	Karanganyar Gunung
12	KARANGSARI	RT 10 RW 05	Karanganyar Gunung
13	MEKARSARI	Rw 04	Kaliwiru

Sumber : data Kantor Kecamatan Candisari, 2021

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Kebijakan Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Penyelenggaraan Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang)**

#### **a. Aspek Struktur**

##### **1) Tataan Pengelolaan Bank Sampah**

Bank Sampah dibentuk dengan Keputusan Lurah yang di dalamnya mencakup tugas dan susunan pengelola Bank Sampah. Sedikitnya susunan pengelola terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi. Pengelola Bank Sampah merupakan masyarakat RW setempat yang peduli terhadap lingkungan. Sutrimo, Ketua Bank Sampah Waras, menyampaikan bahwa:

“Kalau disini itu pengelola Bank Sampah-nya adalah masyarakat yang peduli sama lingkungan, jadi warga yang mau-mau saja”.

Sayangnya tidak semua masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat kota hanya berkuat pada kesibukan sendiri dan hanya mau untuk membayar iuran sampah. Masyarakat yang peduli justru dari kelompok rentan yang memang membutuhkan pekerjaan sebagai pengelola sampah.

Dalam rangka menjalankan bank sampah, Kecamatan melakukan koordinasi antar kelurahan. Tujuannya adalah selain terkoordinasi bank-bank sampah tingkat kelurahan juga untuk

mengembangkan pembelajaran antar pengelola Bank Sampah kelurahan.

Menurut Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari,

“Biasanya kalau kita itu ya koordinasi antar kelurahan, berupa kerjasama dan saling tukar informasi. Misal ada yang kurang-kurang ya saling membantu gitu”.

Menurut Ketua Bank Sampah wilayah lain, masih terdapat koordinasi yang kurang atau belum efektif, seperti penjelasan yang disampaikan oleh Sutrimo, Ketua Bank Sampah Waras Kelurahan Wonotingal yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya agak kurang pak, jadi koordinasinya kadang nggak lancar. Ya ada koordinasi, tetap kita usahakan”

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian di Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh, dimana masalah koordinasi sudah dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Harkat PS, SH, M.Hum, Lurah Jatingaleh yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah pak koordinasi selama ini berjalan lancar, mungkin ada beberapa kendala tapi bisa teratasi dengan baik. Yaa.. harapannya tidak ada kendala ya”

Persoalan koordinasi memang bukan persoalan yang mudah. Banyak rumusan koordinasi namun pelaksanaannya tidak semudah kata yang tertera. Beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi adalah kapasitas pengelola yang masih terbatas, waktu untuk penyelenggaraan koordinasi antar pengurus yang terbatas dan kesibukan pengurus dalam pengelolaan bank sampah yang tinggi. Koordinasi antar kelurahan dalam pengelolaan Bank sampah tingkat

kecamatan bukan menjadi target utama, karena manajemen bank sampah sendiri masih memiliki banyak masalah.

## 2) Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Organisasi Bank Sampah

Volume sampah yang semakin meningkat, sangat berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah konsumsi masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin banyak berdampak pada sampah yang semakin bertambah. Meningkatnya jumlah volume sampah dari tahun ke tahun menimbulkan persoalan serius, terutama di kota-kota besar.

Permasalahan sampah ini akan semakin berat apabila tidak dilakukan perubahan cara pengelolaannya. Paradigma pengelolaan sampah dengan model kumpul-angkut-buang yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat sudah saatnya untuk ditinggalkan. Paradigma pengelolaan sampah lama ini tidak memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, karena dengan menumpuk sampah di suatu tempat justru nantinya sampah yang menggunung tersebut akan menjadi bencana bagi masyarakat.

Sampah yang dikelola dengan cara yang benar justru akan mengurangi timbulnya dampak pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Masyarakat saat ini masih banyak yang menganggap bahwa permasalahan sampah yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat untuk mengatasi

permasalahan sampah dengan mengelola sampah perlu ditingkatkan, karena pada prinsipnya sampah harus dikelola sedekat mungkin dari sumbernya. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah akan mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ada tiga komponen penting yang bertanggung jawab tentang sampah, yaitu: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bank-bank Sampah didirikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada, terutama di wilayah kelurahan di Kecamatan Candisari Kota Semarang merupakan kawasan berpenduduk padat, sehingga produksi sampah yang dihasilkan pun cukup banyak. Sampah-sampah tersebut sebagian besar merupakan sampah dari rumah tangga.

Warga bersama pemerintah kelurahan mencari sebuah solusi bagaimana mengatasi permasalahan sampah ini. Solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah tersebut direalisasikan dengan mendirikan sebuah sistem pengelolaan sampah yang diberi nama Bank Sampah.

Langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami arti dan fungsi didirikan bank sampah. Sosialisasi ini

untuk menggugah masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif untuk mengelola sampah bersama. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi namun persoalan bank sampah bukan hal mudah. Proses pengumpulan sampah dan dikelola tidak banyak menggerakkan masyarakat. Oleh karena itulah peran pengelola menjadi sangat penting.

Dalam pengelolaan Bank Sampah menurut Warisno, SH, selaku Ketua RW di salah satu wilayah Kelurahan Wonotingal menyampaikan bahwa:

“untuk mekanismenya, pengelolaan Bank Sampah kita mulai dari sosialisasi, koordinasi, olah sampah, sampai dengan evaluasi”.

Sedangkan menurut Agustinus Suhermanto, salah satu Ketua RT di wilayah Kelurahan Tegalsari menyatakan bahwa:

“Kalau disini pak prinsipnya ya dari masyarakat, untuk bank sampah, kembali lagi ke masyarakat”.

Tujuan dari diciptakannya bank sampah adalah sebagai strategi untuk membangun kepedulian masyarakat dengan sampah, selain untuk mendapatkan pula manfaat ekonominya. Bank sampah tidak bisa berdiri sendiri tanpa diintegrasikan dengan gerakan 4R (*reduce, reuse, recycle, dan replace*). Hal itu dikarenakan bank sampah perlu dijalankan dengan manajemen yang layak untuk membangun lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Seperti yang disampaikan oleh Suginarti Mahfud, Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh menyatakan bahwa:

“tugas dan fungsi pengelola disini adalah memilih sampah, mengumpulkan dan menjaga lingkungan hidup. Ya sesuai dengan

tujuan kita ya pak, intinya sampah harus diolah supaya tidak mencemari lingkungan”.

Mekanisme pengelolaan bank sampah sama halnya seperti menabung uang di bank, warga yang menjadi nasabah dari bank sampah bisa langsung datang ke bank sampah untuk menyetorkan sampah-sampahnya. Terdapat dua bentuk tabungan di bank sampah, yaitu: (1) tabungan rupiah berupa menukar sampah dengan uang untuk masyarakat perorangan dan tabungan lingkungan berupa partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis untuk melestarikan lingkungan.

Sampah yang dapat ditabung harus sampah yang rapih dan sudah dibersihkan. Minimal sampah yang bisa ditabung adalah dengan ukuran 1 kg. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dicatat di buku rekening oleh petugas. Sampah yang sudah ditimbang kemudian akan dihargai dengan sejumlah uang dan diberikan untuk nasabah yang telah berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Sampah yang disimpan di bank sampah akan dimanfaatkan kembali. Biasanya dalam bentuk tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain.

Sampah plastic merupakan sampah yang sulit diurai, karena itu perlu dikelompokan untuk memerinci pemanfaatannya. Beberapa contoh kemasan plastik yang dapat ditukar, jika dilihat menurut kualitas plastiknya adalah:

- a) Kualitas 1: plastik yang sedikit lebar dan tebal (karung beras, deterjen, dan pewangi pakaian).

- b) Kualitas 2: plastik dari minuman instan dan ukurannya agak kecil (kopi instan, suplemen, dan sebagainya).
- c) Kualitas 3: plastik mie instan.
- d) Kualitas 4: botol plastik air mineral.
- e) Kualitas 0: bungkus plastik yang tidak rapih atau sudah sobek.

Untuk kualitas ini, harus disetor dalam bentuk guntingan kecil-kecil

Mekanisme pengelolaan sampah mulai dari penyetoran sampah, penimbangan, pencatatan di buku tabungan, pemilihan sampah sampai penjualan sampah ke pengepul atau pengolahan sampah yang sudah terkumpul. Sebagaimana disampaikan oleh Harkat PS, SH, M.Hum, Lurah Jatingaleh,

“Sampah dari warga dikirim dan dipilih kemudian dikirimkan ke Bank Sampah selanjutnya dipilah dan olah”.

Sementara menurut Suginarti Mahfud, Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh menyampaikan hal yang lebih terperinci tentang kegiatan di Bank Sampahnya, yaitu:

“Sampah yang datang, kita pilah, timbang, catat, dan dimasukkan ke arsip tabungan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari yang menyampaikan bahwa:

“Kalau disini mekanisme dan prosedur pengelolaannya ada pengumpulan, pilah timbang, dan daur ulang pak”.

## **b. Aspek Sistem Manajemen**

### 1) Proses Perencanaan Program

Bank Sampah tidak mendapatkan dukungan anggaran dana operasional dari Pemerintah. Dana operasional berasal dari donasi sampah/swadaya masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Desak Putu Menuh, Ketua Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang menyatakan bahwa:

“Biaya operasional bank sampah kita ini berasal dari donasi sampah/swadaya saja pak”.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.

Perencanaan program kerja Bank Sampah dilaksanakan oleh pengelola Bank Sampah bekerja sama dengan lembaga masyarakat RT/RW setempat. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, seperti yang disampaikan oleh Sutrimo, Pengelola Bank Sampah Waras Kelurahan Wonotingal:

“3 bulan sekali kita melakukan rapat dan evaluasi pak.. ya untuk melihat apakah program sudah sesuai dengan rencana di awal”.

Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan

sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu bank sampah dirancang sendiri oleh masyarakat. Semua proses perencanaan program dilakukan oleh warga dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suginarti Mahfud, Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh yang menyampaikan:

“kalau untuk proses perencanaan program itu dilaksanakan berdasarkan persetujuan semua pihak RT, RW, dan masyarakat sekitar”.

## 2) Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi Barang Ekonomis. Manfaat bank sampah untuk

masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras. Bank sampah juga bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara dengan pegangan buku kas. Bendahara mengelola modal Bank Sampah yang didapatkan dari iuran anggota. Menurut Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari:

“modal kita didapatkan dari penjualan sampah yang terkumpul”.

Pengelola Bank Sampah dalam melaksanakan tugas tidak menerima upah atau bekerja sukarela. Pekerjaan ini merupakan kerja sosial yang dilaksanakan menyesuaikan waktu luang yang mereka miliki. Menurut Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari menyampaikan bahwa:

“kita ini kerja sosial ya pak, sukarela, jadi memang tidak menerima upah”.

Pengelolaan Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari sudah menunjukkan hasil yang bisa dinikmati oleh sebagian warganya. Fungsi sosial diwujudkan dengan membantu warga yang kurang mampu dengan membantu pembayaran iuran BPJS setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Sartini, pekerja Bank Sampah Mugi Berkah Sari yang menyampaikan:

“Kalau saya ini niatnya kerja disini ya ingin membantu warga yang kurang mampu bayar BPJS”.

Hal ini didukung oleh Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari yang menyatakan:

“Kita kerjasama juga dengan puskesmas Kagok untuk pembayaran BPJS mandiri warga yang tidak mampu.”

### 3) Proses Evaluasi Dan Pengawasan

Proses evaluasi dan pengawasan dilaksanakan oleh DLH Kota Semarang. Pengelola juga melaksanakan rekapitulasi setiap bulan. Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari menyampaikan:

“Pernah pak, dulu itu dilaksanakan evaluasi Bank Sampah di wilayah kami ini “dengan BINTARI”, tetapi kalau dari pemerintah belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan di sini.”

Sementara itu Agustinus Suhermanto, Ketua RT di Kelurahan Tegalsari, menyampaikan:

“Kalau Bank Sampah Mugi Berkah Sari ini pernah dikunjungi oleh Walikota Semarang pak, bersama Ketua TP PKK Kota Semarang.”

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan dua aspek yaitu evaluasi hasil ekonomi dan peran serta masyarakat. Aspek ekonomi

di bank sampah meliputi harga beli sampah dari nasabah kepada pengurus bank sampah dan harga beli dari pengurus kepada pengepul serta keuntungan ekonomi dari nasabah bank sampah itu sendiri. Harga beli yang diterapkan oleh pengurus terhadap nasabah dan pengepul kepada pengurus adalah fluktuatif dan tidak ada selisih atau perbedaan harga pada keduanya. Hal ini apabila ditinjau dari segi ekonomi, pengurus mengalami kerugian karena tidak adanya selisih harga penjualan. Operasional bank sampah hanya mengandalkan kepada penjualan buku tabungan bagi nasabah baru dan hasil jasa dari fasilitas simpan pinjam yang ada serta bantuan dari pemerintah. Dengan manajemen kepengurusan bank sampah seperti di atas, bank sampah sangat rentan dalam keberlanjutannya mengingat tidak adanya keuntungan bagi pengurus dan biaya operasional bank sampah tersebut.

Peran serta masyarakat di dalam bank sampah dari penyediaan tempat sampah terpilah di setiap rumah, walaupun tempat sampah terpilah ini masih belum memenuhi standar tempat sampah namun sudah cukup memadai dalam menampung sampah organik maupun anorganik yang dihasilkan. Peran serta lainnya dalam pemilahan sampah di sumber. Nasabah bank sampah telah melakukan pemilahan sampah di sumber berdasarkan komposisi sampah anorganiknya. Sebagai contoh adalah sampah kertas, nasabah telah dapat memilah

antara kertas hvs, kertas buku, kertas majalah, kertas koran dan kertas kardus.

Hasil evaluasi ini menjadi catatan penting bagi pengurus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan yang terpenting adalah keberlanjutan.

#### 4) Akuntabilitas Penyelenggaraan Bank Sampah

Bentuk akuntabilitas bank sampah adalah adanya laporan kepada warga masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup selaku yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, berupa laporan penggunaan anggaran pengelolaan bank sampah. Sebagaimana dikatakan oleh informan bahwa:

“Kegiatan bank sampah mulai dari kegiatan penimbangan, perkembangan jumlah nasabah, jumlah pembelian sampah daur ulang, dan penjualan sampah daur ulang kepada vendor-vendor terdokumentasi dengan baik karena kegiatan ini senantiasa dilaporkan perkembangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup”.

Dari penelusuran observasi ditemukan bahwa semua bank sampah mendokumentasikan secara baik segala kegiatannya, baik berupa kegiatan penimbangan maupun administrasi keuangan, namun ada juga bank sampah unit yang tidak melakukannya sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Kami sebagai pengurus bank sampah senantiasa melakukan pencatatan-pencatatan kegiatan nasabah termasuk pembelian sampah daur ulang dari nasabah dan penggunaannya”.

Sebaliknya ditemukan pula informasi bahwa ada beberapa bank sampah yang tidak melengkapi pencatatan-pencatatan kegiatan

operasional bank sampahnya sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Pencatatan kami kurang lengkap karena keterbatasan tenaga dan kesibukan masing-masing pengurus, sehingga hampir kami tidak melakukan laporan kepada sesama pengurus.”

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pendokumentasian yang dilakukan bank sampah sudah baik, namun, pada bank sampah ada yang melakukan pendokumentasian dengan baik dan ada juga yang belum melakukan pendokumentasian dengan baik.

Secara berkala Bank Sampah mengadakan rapat pengurus sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Bank Sampah. Selain itu juga ada buku rekapitulasi pendapatan Bank Sampah setiap periode. Desak Putu Menuh, Ketua Bank Sampah Raflesia menyampaikan:

“Setiap bulan tutup buku, kemudian setiap tahun juga ada pembagian tabungan nasabah”.

Sedangkan menurut Sri Untari, Ketua Bank Sampah di wilayah Tegalsari menyampaikan:

“Mekanisme pertanggungjawaban pengelola Bank Sampah disini dilakukan dengan membuat laporan tiap 1 bulan dan 3 bulan sekali”.

Berdasarkan informasi dari pengelola Bank Sampah Raflesia, dari awal pembentukan Bank Sampah sampai saat ini belum pernah dilakukan pemeriksaan dari pemerintah kota. Begitu pula dengan Bank Sampah Mugi Berkah Sari.

### c. Aspek Manusia

#### 1) Proses Komunikasi Antara Pengelola Dengan Masyarakat

Sasaran bank sampah adalah warga masyarakat. Sebagaimana Tujuan dari adanya bank sampah adalah mengolah sampah dari sumber, oleh karenanya peran serta masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah menjadi andalan. Sayangnya peran serta masyarakat masih rendah terbukti dari masih banyaknya sampah yang terbuang secara sembarangan dan tidak dikelola oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar.

Warga yang merupakan pengelola Bank Sampah melakukan sosialisasi di setiap kesempatan guna penyadaran masyarakat. Menurut Desak Putu Menuh, Ketua Bank Sampah Raflesia:

“Model komunikasi yang digunakan itu berupa edukasi dan himbauan pak, jadi ya kita saling bertukar informasi.. *sharing* gitu”.

Sementara itu dari Nur Ikhsan, salah satu aparat Kelurahan Jomblang menambahkan:

“kita biasanya ini pak.. mmm.. memberi himbauan gitu ya melalui surat kepada warga di sekitar sini”.

Sedangkan menurut Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari juga menambahkan:

“Lewat ini pak.. acara PKK atau Dawis ya.. jadi sosialisasinya di PKK RT dan Dawis”.

Sosialisasi memang sudah dilakukan, namun proses ini tidak bisa berhenti pada sosialisasi semata. Voluntary sebagai pengelola tidak memungkinkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terus

menerus, oleh karenanya dilakukan sosialisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan RW hingga RT dan Dasa Wisma. Rentang kendali ini dipersempit agar memudahkan komunikasi antara warga dengan masyarakat.

## 2) Proses Partisipasi (Menggerakkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat) terhadap Sampah

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Selain mengelola sampah, Bank Sampah juga membantu menjual hasil kerajinan warga. Hasil kerajinan tersebut terbuat dari sampah-sampah plastik yang dapat dibuat menjadi barang-barang bernilai ekonomi seperti tas, bros, dll. Dengan adanya Bank Sampah ini diharapkan bisa ikut membantu mengatasi masalah sampah, serta dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan keluarga.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dilatarbelakangi oleh dorongan yang ada dalam diri pribadi dan karena ada ajakan dari pihak luar baik dari teman maupun pengurus Bank Sampah itu sendiri. Hal yang menjadi alasan mengapa mereka ikut

berpartisipasi itu sendiri cukup beragam mulai dari permasalahan sampah yang mereka rasakan setiap harinya terhadap pengelolaan sampah hingga motivasi individu berdasarkan manfaat yang mereka dapatkan ketika ikut berpartisipasi.

Tingkat partisipasi yang diberikan anggota bank sampah terhadap kegiatan pengelolaan sampah baik pada saat perencanaan kegiatan dan saat implementasi kegiatan, terdapat satu tingkat partisipasi dimana terdapat mekanisme *take and give* dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan-kegiatan yang dirancang Bank Sampah tidak hanya mendatangkan manfaat bagi anggota bank sampah, sebaliknya juga pengurus bank sampah mendapat manfaat dari kontribusi yang diberikan anggota bank sampah seperti memilah dan menabung sampah, serta bantuan membuat kerajinan dari sampah saat ada pesanan souvenir.

Pengetahuan, sikap dan perilaku adalah unsur partisipasi. Kesadaran individu yang ada pada anggota bank sampah diawali dari adanya permasalahan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan kesadaran yang muncul dari pihak eksternal adalah melalui sosialisasi yang dilakukan pengurus Bank Sampah maupun pemberitaan dari teman mengenai keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Bank Sampah itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan teori Siti Irene (2011: 50) yang menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan

emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Masyarakat mendukung secara aktif adanya Bank Sampah. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat menyetor sampah. Sri Untari, Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari, menyampaikan:

“Salah satu implementasi dukungan masyarakat adalah dengan cara menjadi nasabah bank sampah, tetapi kesadaran masyarakat masih sedikit dalam pemilihan sampah”.

Sama halnya dengan Kelurahan Wonotingal, menurut Sutrimo, Ketua Bank Sampah Wonotingal:

“Sikap masyarakat terhadap keberadaan Bank Sampah masih kurang tanggap/kurang respon, dan kesadaran masyarakat sebenarnya sebagian sudah ada kesadaran, tapi memang masih banyak juga yang belum sadar”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah yaitu faktor pengetahuan mengenai permasalahan dan pengelolaan sampah, hal ini menjadikan masyarakat sadar bahwa isu mengenai permasalahan sampah ini memunculkan kepedulian sehingga ikut berpartisipasi.

Faktor kedua adalah keyakinan untuk ikut serta menciptakan perubahan, hal ini karena berkurangnya volume sampah buangan di rumah maupun yang dibuang ke bak sampah, bertambahnya pemasukan mereka dari hasil menabung sampah dan masyarakat membiasakan untuk memilah sampah, memunculkan suatu

kedisiplinan dalam membuang sampah. Faktor prinsip insentif dan manfaat, karena masyarakat dapat memperoleh manfaat lingkungan yang didapat anggota dengan mengikuti pengelolaan sampah adalah motivasi untuk memilah sampah di rumah tangga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke bak sampah serta menciptakan lingkungan yang bersih. Menurut Pita Nurmani, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tegalsari:

“Pengetahuan masyarakat tentang sampah mencakup masyarakat dapat memilah sampah yang organik dan an organik, tapi di wilayah sini belum semua warga melaksanakan pemilahan sampah”.

Manfaat sosial yang didapat anggota dengan berpartisipasi adalah dapat mempererat silaturahmi, mendapatkan teman baru baik sesama anggota bank sampah maupun dengan pengurus bank sampah. Manfaat ekonomi yang didapat anggota dengan berpartisipasi adalah merubah sampah yang harusnya tidak memiliki nilai menjadi uang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah

### 3) Kemampuan Operasionalisasi Bank Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut dan buang, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber

daya alternatif yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung juga disebut nasabah, nasabah tersebut pun memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerjasama.

Tujuan utama didirikannya Bank Sampah adalah untuk menjaga lingkungan. Dengan terjaganya lingkungan, dampak yang paling jelas dirasakan adalah berkurangnya jumlah sampah dan lingkungan menjadi bersih karena masyarakat juga mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan. Jika lingkungan terjaga maka tingkat kesehatan akan meningkat. Selain itu, dengan menabung di Bank Sampah amal jariyah nasabah juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Salah satu alasan memilih bank sampah yaitu sistem administrasi yang mudah dan juga dapat diterima oleh semua nasabah.

Aktivitas pendaftaran sebagai anggota bank sampah sangat mudah, yaitu dapat dilakukan dengan hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu aktivitas kegiatan nasabah lakukan tidak mendapatkan tuntutan dan target yang ditentukan melainkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dengan mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja.

Berdasarkan administrasi, nasabah mempunyai alasan dimana pencairan dana yang mudah. Nasabah aktif dalam pekerjaannya disebabkan lokasi Bank Sampah dekat dengan area tinggal nasabah tersebut, sehingga mudah dalam berangkat ke lokasi bisa teratur dan rutin

Kemampuan masyarakat dalam operasionalisasi Bank Sampah cukup baik. Masyarakat berperan aktif di dalamnya sebagai nasabah maupun pengelola Bank Sampah, sebagaimana disampaikan oleh sebagian besar responden.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat yang tergabung dalam program bank sampah harus melakukan pemilahan sampah baik sampah organik maupun anorganik. Setiap masyarakat yang mendaftar untuk menjadi anggota bank sampah akan mendapatkan nomor dan buku tabungan, penjumlahkan nilai harga sampah yang di bawa masyarakat tergantung jenis sampah yang di bawa.

Warga yang menabung juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga yang dipinjam. Sampah yang di tabung di timbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Bank sampah bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta membantu menambahkan pendapatan masyarakat.

Pengelola bank sampah telah membuat alur mekanisme menabung bagi nasabah, ada dua macam cara yaitu; pertama, nasabah menyetorkan sendiri sampah anorganik yang mereka kumpulkan ke Bank Sampah. Jika sampah yang dibawa sudah dipilah, petugas bank sampah yang menerimanya akan langsung menimbang. Jika belum dipilah, sampah tersebut akan dipilah terlebih dahulu sesuai dengan karakteristik sampahnya kemudian dilakukan penimbangan dengan nilai harga sesuai jenis sampahnya. Jumlah nilai uang sampah yang ditimbang tersebut dituliskan pada buku tabungan nasabah.

Buku tabungan menerangkan kategorisasi sampah anorganik meliputi kardus, besi, plastik dan lainnya. Kedua, petugas Bank Sampah menjemput sampah dirumah nasabah. Cara ini dilakukan jika nasabah meminta atau sampah yang ingin disetorkan terlalu berat. Adanya fasilitas motor roda tiga memudahkan petugas membawanya dan selanjutnya di timbang di Bank Sampah.

Guna tertibnya nasabah saat menabung, bank sampah membuat alur menabung. Nasabah yang datang langsung menuju ke meja pimpinan bank sampah, dibagian ini nasabah baru membuat buku tabungan, untuk nasabah lama dapat menanyakan harga perjenis sampah yang saat ini berlaku. Kemudian nasabah menuju bagian pemilahan dan penimbangan. Data hasil penimbangan dibawa kembali ke pegawai pengelola sampah untuk selanjutnya dibantu dilakukan proses pencatatan di buku oleh pegawai bank sampah. Terakhir nasabah kembali menuju ke pihak bank sampah untuk melakukan penarikan uang jika langsung ingin di ambil.

Umumnya nasabah tidak langsung mengambil uang kecuali yang memilih jenis tabungan seperti jual beli sampah. Di bank sampah salah satu manajemen sistem operasionalnya adalah akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak mengetahui dan mengerti kedudukannya. Sedangkan transaksi merupakan pelaksanaan; perjanjian, dengan demikian, transaksi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang merupakan bentuk kesepakatan dalam pengelolaan uang yang bertujuan untuk menjaga batasan-batasan terhadap transaksi agar tidak keluar dari koridor yang disepakati. Ada tiga nilai spiritual yang terdapat dalam transaksi ini, yaitu nilai amanah atau keimanan, keadilan dan moral.

#### 4) Kemampuan Menghadapi Complain Maupun Dukungan

Bank sampah memberikan 5 (lima) komponen yang melekat dalam sebuah kerjasama, antara lain: adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, adanya akuntabilitas dan tanggungjawab, adanya keterampilan komunikasi dan bekerja dalam kelompok. Adanya kerjasama juga akan memperkuat modal sosial yang memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antar warga.

Pengadaan bank sampah bertujuan untuk menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan (Permen Lingkungan Hidup RI No.13 Tahun 2012). Manfaat bank sampah tidak hanya untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi nasabah ataupun pengurus (Challcharoenwattana, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengurus Bank Sampah Sangkan Amanah (Garut, 2017), diketahui, keberadaan Bank Sampah telah memberikan pemasukan tambahan bagi warga, menumbuhkan semangat untuk memilah sampah dan suasana gotong royong di tengah-tengah masyarakat.

Berjalan lancar atau tidaknya suatu bank sampah ditentukan oleh berbagai faktor seperti *availability*, *performance*, dan *quality* (Kristina, 2014). Secara singkat, keefektifitasan bank sampah dilihat dari kemudahan akses bank sampah tersebut, baik

untuk nasabah, pengurus, dan stakeholder. Kemudian terdapat pembagian kerja yang jelas, tidak ada penolakan dalam proses pemberdayaan, dan program yang ada berhasil terlaksana serta berdampak signifikan. Keefektifitasan suatu bank sampah dapat dilihat dari indikator kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat (Damayanti, 2014).

Dalam menjalankan bank sampah perlu memerhatikan faktor efektifitas dan faktor penghambat. Menurut Juliandoni (2013), terdapat 4 faktor penghambat berjalannya suatu bank sampah, yaitu partisipasi nasabah yang rendah, harga beli 'tukang loak' yang lebih tinggi, ketersediaan transportasi untuk mengangkut sampah yang tidak memadai, dan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan. Selain itu, terdapat faktor tambahan seperti, pendapat bahwa dengan berpartisipasi dalam bank sampah seakan-akan mengambil rezeki pemulung.

Tentang complain atau keluhan masyarakat ada sebab ada juga akibat.. Mayoritas keluhan yang datang dari mereka adalah pada nilai sampah yang terlampau kecil pengharagaannya, namun complain tersebut tidak mematahkan masyarakat untuk mengumpulkan sampah. Keluhan masyarakat memang tidak bisa dihindari, karena pengelola tidak mungkin bisa memuaskan seluruh masyarakat.

Masyarakat sadar dan mendukung adanya Bank Sampah. Bentuk dukungan masyarakat berupa kontribusi mereka sebagai nasabah maupun kesukarelaan mereka untuk memberikan materi.

Soenarto, warga Kelurahan Tegalsari pernah complain atas keberadaan Bank Sampah yaitu terkait waktu angkut, keramahan dan gangguan bau. Atas complain tersebut, pengelola Bank Sampah memberikan tanggapan yang baik.

Menurut Soleh, Lurah Wonotingal, Bank Sampah Waras pernah mendapatkan complain sebagai berikut:

“Ada komplain itu dulu terkait komposter yang dekat rumah warga, yaa.. pengelola Bank Sampah menanggapi dengan memberikan pengetahuan dan minta pengertian”.

##### 5) Peran *Stakeholder* dalam Penyelenggaraan Bank Sampah.

Peran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan role merupakan pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam strata sosial di masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat dapat melakukan sebuah perubahan positif bagi lingkungan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas – tugas yang dimilikinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Wulandari, 2013).

Para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang penting demi kelangsungan sebuah organisasi atau lembaga. Para pemangku kepentingan biasanya disebut dengan istilah stakeholder merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari 2 kata yaitu kata stake dan holder.

Secara garis besar istilah stakeholder memiliki makna sebagai seorang individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi di dalam sebuah lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. Stakeholder biasanya memiliki hubungan keterkaitan dan kemampuan untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi baik dalam lingkup internal atau eksternal.

Menurut Maryono dalam (Nugroho, 2019) terdapat tiga jenis stakeholder yaitu: (a) Stakeholder primer yaitu stakeholder yang menerima dampak langsung dari suatu rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif, stakeholder ini biasanya banyak terlibat di dalam proses awal hingga akhir sebuah kegiatan; (b) Stakeholder kunci yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau kegiatan karenanya merekalah yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan secara penuh; (c) Stakeholder sekunder, yaitu stakeholder pendukung biasanya mereka tidak terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena mereka tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi mereka memiliki peran dalam mendukung dan memberi saran / masukan terhadap sebuah program.

Berkaitan dengan klasifikasi selanjutnya apabila dianalisis menurut tingkat kepentingan dan pengaruh seorang tokoh bernama Gardener et al., dalam (Nugroho, 2019) mengklasifikasikan beberapa stakeholder sebagai berikut: (a) Subyek (Subject) merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi 7 akan tetapi memiliki pengaruh yang rendah.; (b) Pemain kunci (key player) adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi serta memiliki pengaruh yang tinggi pula; (c) Pengikut (Crowd) adalah stakeholder yang memiliki pengaruh yang rendah serta kepentingan yang rendah juga; (d) Pendukung (contest setter) adalah stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Stakeholder Primer adalah masyarakat yang berperan sebagai implementor. Masyarakat berperan sebagai pelaksana program artinya masyarakat adalah pihak yang bertanggung jawab untuk ikut melaksanakan kegiatan pilah sampah di wilayahnya masing-masing bersama dengan KSM masing-masing RW dari mulai kegiatan pemilahan mandiri yang dilakukan oleh setiap KK dirumah masing-masing. Kemudian pengangkutan sampah menuju Bank sampah, penimbangan sampah, penyortiran, pengiriman sampah ke pengepul atau produksi kerajinan tangan dari sampah (khusus sampah yang masih dapat digunakan). Semua rangkaian kegiatan tersebut membutuhkan bantuan dan peran aktif dari masyarakat, namun ternyata tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian

terhadap masalah tersebut dan cenderung apatis. Hanya sebagian saja masyarakat memiliki kesadaran yang mau turut terlibat dalam kegiatan pilah sampah.

Jika dihitung persentasenya hanya 47% saja keluarga yang mau turut berpartisipasi. Diperlukan peran serta dan dukungan dari banyak pihak untuk dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif.

Stakeholder Kunci Bank Sampah berperan sebagai stakeholder kunci (key player) koordinator, implementor dalam program pilah sampah. Bank sampah merupakan organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan pilah sampah melalui KSM agar tetap rutin terlaksana setiap bulan. Kegiatan terkait peran Bank sampah sebagai berikut;

- (1) merencanakan dan mengelola program pilah sampah;
- (2) mengkoordinir seluruh kegiatan terkait pilah sampah;
- (3) melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait program pilah sampah, seperti mengolektif pengumpulan sampah yang telah dipilah dari kemudian menyetorkan sampah terpilah ke pengepul;
- (4) kelompok swadaya masyarakat/ksm berperan sebagai akselator, koordinator, Implementor. Kelompok swadaya masyarakat atau disingkat KSM merupakan organisasi swadaya masyarakat yang terbentuk dengan tujuan mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat sekitar.

Kelompok ini pada mulanya merupakan inisiatif dari warga masyarakat yang tergerak karena melihat pengelolaan sampah terpadu di yang berjalan sukses dan memberi banyak manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ibu-ibu pada menjadi termotivasi karena percontohan yang memiliki permasalahan yang serupa yaitu terkait sampah.

Stakeholders Sekunder yang diidentifikasi adalah :

- 1) Pemkot Semarang Berperan sebagai *policy creator* dan Fasilitator. Pemerintah kota membuat sebuah kebijakan terkait pengelolaan sampah di kota Semarang yang bertujuan mengatur dan menjadi pedoman pengelolaan sampah yang baik yang mana memiliki legalitas hukum yang memaksa pihak-pihak terkait agar patuh dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Berdasarkan Perda Kota Semarang No.6 Tahun 2012 pasal 30 dan 31 ayat 1), Pemerintah daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana kerja dalam hal ini sesuai dengan Misi ke-3 kota Semarang yaitu mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan sampah di lingkup kecamatan maupun kelurahan akan tetapi pemerintah kurang dalam hal tersebut. Pada program pilah sampah di kelurahan pemerintah kota dirasa kurang memperhatikan dan mendukung fasilitas pilah sampah sehingga masyarakat menggunakan fasilitas

seadanya yang tentunya hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal.

- 2) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai policy creator, koordinator, fasilitator. Berdasarkan hasil penelitian DLH berperan merumuskan kebijakan dan rencana strategis bidang lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan di kota Semarang sesuai dengan visi misi walikota, mengkoordinasi program melalui sosialisasi dan pelatihan atau workshop dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan sampah, monitoring evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sampah, memfasilitasi pelaksanaan program. Peran Dinas lingkungan hidup dalam mendukung dan mendorong kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini dilaksanakan dengan cukup baik dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah bekerjasama dengan kelurahan serta melaksanakan kegiatan pelatihan / workshop pembuatan produk kreatif bernilai jual dari sampah. Masyarakat pada awalnya cukup antusias namun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop hanya dilakukan beberapa kali saja diawal dan kurang adanya monitoring dari pihak Dinas untuk melakukan pemantauan keberjalanan program. DLH tetap berusaha untuk mendukung dan memfasilitasi program pilah sampah dengan cara menjadi pengepul sampah hasil pilah sampah.

3) Kecamatan sebagai koordinator kecamatan berperan mengkoordinasi lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan, mengawasi pelaksanaan tertib pengelolaan sampah mulai dari lingkup rukun warga dan kelurahan, mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah. Kecamatan belum optimal melaksanakan perannya karena kecamatan hanya melaksanakan koordinasi ke pengelola sampah di kelurahan namun belum turut berpartisipasi didalam kegiatan pengelolaan sampah.

Peran Aparat kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penyelenggaraan Bank Sampah dilakukan dengan mengadakan kunjungan dan pembinaan kepada Bank Sampah. Namun peran ini dirasakan masih kurang maksimal seperti yang disampaikan oleh Nur Ikhsan, salah satu aparat Kelurahan Jomblang:

“peran pemerintah itu ada pak.. tapi ini.. gimana ya.. ada tapi kurang maksimal mungkin, seperti itu”.

## **2. Permasalahan Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengelola Bank Sampah di Kelurahan Jatingaleh, didapatkan beberapa masalah yang belum bisa diselesaikan oleh pihak pengelola, diantaranya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pengelola Bank Sampah dirasakan masih kurang. Peralatan untuk kegiatan pilah sampah masih kurang

sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang optimal, seperti yang disampaikan oleh Suginarti Mahcfud Ketua Bank Sampah Melati yaitu:

“Kurangnya mesin pencacah sampah plastic menyebabkan pengelolaan sampah memakan waktu yang lebih lama pak dan tempat yang lebih banyak. Mesin ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah, dikarenakan sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai.”

Permasalahan yang sama juga dialami di Kelurahan Jomblang, seperti disampaikan oleh Misriyah yang merupakan salah satu pekerja menyatakan:

“Peralatan untuk kegiatan pilah sampah masih kurang sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang optimal, seperti gunting, *cutter*, sarung tangan, timbangan untuk menimbang dalam jumlah besar”.

Sementara di Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari menurut Sri Untari menyatakan bahwa :

“Perlengkapan Bank Sampah masih kurang pak, sedangkan dibutuhkan pengelola dan masyarakat untuk dapat mengelola bank sampah”.

Sarana transportasi juga menyumbangkan permasalahan yang dialami oleh para pengelola Bank Sampah, seperti yang disampaikan oleh Sri Maryati, pekerja di Bank Sampah yang menyatakan bahwa :

“Belum adanya sarana armada angkut memadai yang dapat mempercepat dalam pengangkutan sampah di Bank Sampah. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif”

Pernyataan ini didukung oleh Pita Nurmani selaku Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tegalsari yang menyatakan bahwa :

“sarana air bersih dan transportasi masih terbatas ya.. jadi mungkin masih kurang optimal.”

Dalam pengelolaan Bank Sampah diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dirasakan masih kurang optimal, seperti yang disampaikan oleh Bambang Sisworo selaku Ketua RT di wilayah Kelurahan Jatingaleh sebagai berikut :

“Kurangnya subsidi pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu permasalahan di Kelurahan Jatingaleh.”

Lain halnya dengan wilayah kelurahan lain, di Kelurahan Wonotingal ditemukan masalah yang dikeluhkan oleh pengelola dan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Soleh selaku Lurah Wonotingal yang menyatakan bahwa:

“Dana operasional ini kadang kurang pak, jadinya sistem operasional pengelolaan sampah kurang optimal.”

### **3. Saran Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada, diperlukan saran-saran atau masukan yang bisa menjadi solusi. Beberapa saran yang diungkapkan oleh masyarakat, pengelola, maupun pemerintah di wilayah Kelurahan Jatingaleh seperti disampaikan oleh Suginarti Mahcfud, Ketua Bank Sampah Melati sebagai berikut:

“Bisa diadakan peningkatan jumlah subsidi untuk sarana dan prasarana (armada angkutan sampah), serta pengembangan SDM, yang nantinya mampu menjadi solusi dari permasalahan pengelolaan Bank Sampah yang ada di Kelurahan Jatingaleh”

Pernyataan yang hampir sama disampaikan juga oleh Sri Maryati, pekerja Bank Sampah yang menyatakan :

“Pengadaan pengangkut, gerobak/alat mengangkut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dari segi waktu dan tenaga untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di Bank Sampah”

Sementara Bambang Sisworo salah satu ketua RT terkait peningkatan Sumber daya manusia menyatakan bahwa :

“Untuk pengadaan subsidi pengembangan SDM ya pak, sebagai upaya peningkatan keterampilan pengelolaan sampah”

Di wilayah Kelurahan Jomblang juga memberikan beberapa masukan dan saran dalam menangani permasalahan yang ada, diantaranya disampaikan oleh Nur Ikhsan, salah satu Perangkat kelurahan Jomblang yang menyatakan ::

“Butuh bantuan operasional untuk pengurus Bank Sampah, supaya bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelola dalam mengelola Bank Sampah sehingga didapatkan hasil yang optimal dan mewujudkan tujuan dari Bank Sampah”

Sedangkan Misriyah salah satu pekerja di Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang menyampaikan :

“Lebih sering diadakan lomba-lomba dan pendampingan juga, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pengelola dan menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman”

Sementara Asih Purwanti sebagai salah satu anggota masyarakat menyampaikan saran sebagai berikut :

“Permintaan bantuan peralatan untuk pilah sampah juga diharapkan mampu dipenuhi oleh pihak pemerintah sehingga pengelola dapat bekerja lebih maksimal.”

Di wilayah Kelurahan Tegalsari memberikan beberapa masukan dan saran diantaranya dari Sri Untari Ketua Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari yakni :

“Melakukan sosialisasi pilah sampah di masyarakat menjadi salah satu saran dari masyarakat, sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah meningkat sehingga operasional Bank Sampah dapat berjalan lebih maksimal”

Sementara itu Pringgo Sutjahyo Tunggal Rino, Ketua RW di Kelurahan Tegalsari menyatakan bahwa:

“Pengadaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja SDM pengelola Bank Sampah, seperti pelatihan pembuatan produk yang berbahan dasar sampah, dan lain sebagainya”

Hal tersebut diatas juga di tambahkan saran oleh Agustinus Suhermanto salah satu ketua RT di Kelurahan Tegalsari yang menyampaikan bahwa :

“Ketersediaan air bersih, kendaraan pengangkut sampah dari warga, pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik, peran aktif pemerintah dalam pemasaran dan pengembangan ekonomi produktif dari sampah diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah demi terwujudnya Bank Sampah yang lebih baik”

Masukan dan saran dari wilayah Kelurahan Wonotingal diantaranya disampaikan oleh Soleh Lurah Wonotingal yang menyatakan:

“Pemerintah kota/dinas terkait di harapkan lebih berperan aktif dan tanggap. Peran pemerintah merupakan salah satu komponen penting untuk optimalisasi kinerja Bank Sampah”

Juga ditambahkan oleh Priyatno salah satu pekerja bank sampah bahwasannya peran masyarakat juga mutlak dibutuhkan untuk hasil yang maksimal.

“Selain pemerintah, peningkatan peran masyarakat juga diharapkan berjalan beriringan dengan peran pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal”

Sementara itu Warisno salah satu Ketua RW di Kelurahan Wonotingal menyatakan bahwa:

“Peningkatan peran serta masyarakat, daya dukung pengusaha/penggiat usaha, dan daya dukung pemerintah”

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah di Wilayah Pemerintahan Kecamatan Candisari sudah berjalan sesuai dengan Kebijakan Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, melalui tahapan-tahapan dan peran serta masyarakat yang menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Program pemilahan sampah yang dijalankan oleh Bank Sampah di wilayah kecamatan Candisari merupakan implementasi dari program pemilahan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R. Tujuan yang ingin dicapai dari Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat dengan berdirinya Bank Sampah yang menggunakan prinsip 3R adalah sebagai berikut:

- a. Mereduksi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA, yang berarti juga akan memperpanjang usia teknis TPA dan mengurangi biaya pengelolaan sampah yang harus dikeluarkan Pemerintah.
- b. Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga (di tingkat sumber)

- c. Merubah perilaku (paradigma) masyarakat dalam pengelolaan sampah, dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 15), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Perda nomor 6 Tahun 2012 melalui penyelenggaraan bank sampah yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari. Pengelolaan Bank Sampah oleh bank sampah ini dibatasi pada analisis aspek sistem, analisis aspek struktur, dan analisis aspek manusia (masyarakat).

## **1. Analisis Aspek Struktur**

### **1) Tatanan Pengelolaan Bank Sampah.**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keberadaan Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari secara umum sudah terorganisir dengan baik. Organisasi Bank Sampah sudah mendapatkan pembinaan dari Instansi terkait terutama dengan pihak Kelurahan setempat serta dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pembinaan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur kelembagaan yang ada di wilayah.

Struktur Organisasi Bank Sampah terdiri dari para pengelola Bank Sampah yang merupakan warga setempat yang dipilih dan disepakati

bersama oleh masyarakat setempat. Tugas pokok dan fungsi pengelola Bank Sampah adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Berikut ini contoh Struktur Organisasi Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh dan Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang.



Gambar 5. Struktur Organisasi Bank Sampah

Hal ini sudah sesuai dengan salah satu implementasi dari Perda Kota Semarang nomor 6 Tahun 2012 khususnya dalam pasal 6 point a yaitu “menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah”, dimana masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari sudah memiliki kesadaran untuk mendirikan Bank sampah yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah. Selain itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan mengumpulkan dan

memilah sampah yang kemudian akan diangkut oleh petugas atau pengelola dan diolah di Bank Sampah.

b. Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Organisasi Bank Sampah

Pengelolaan organisasi Bank Sampah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah disepakati oleh masing-masing pengurus bank Sampah sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya. Pembinaan juga dilaksanakan oleh Instansi terkait terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah. Pemberian bantuan ini dirasakan masih kurang karena tidak semua bank sampah mendapatkan alat sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Di Kota Semarang pengelolaan sampah dilakukan secara konvensional, yaitu sampah rumah tangga di buang ke tong sampah di depan rumah kemudian ada mobil atau motor sampah yang mengambilnya. Kemudian mobil sampah tersebut meletakkannya di tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Setelah di TPS ada truk sampah yang mengambil sampah tersebut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Selain itu, pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan juga berperan dalam pengelolaan sampah secara umum di Kota Semarang. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (Reduce, Recycle, Reuse). Namun tidak semua

Bank Sampah melakukan kegiatan pendaur ulangan sampah, khususnya untuk sampah jenis non organik. Beberapa Bank Sampah mengelola sampah mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos baik dengan menggunakan teknik takakura maupun dengan menggunakan teknologi mesin. Sedangkan kegiatan pendaurulangan sampah jenis non organik menjadi aneka ragam jenis kerajinan hanya dilakukan oleh sebagian kecil Bank sampah. Sebagian besar Bank Sampah yang lain lebih memilih menjual sampah non organik kepada pengepul sampah.



Gambar 6. Contoh hasil kerajinan daur ulang sampah

Dalam perda nomor 6 tahun 2012 Pasal 6 huruf d, menyebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah “melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah”. Untuk itu diharapkan hal ini bisa di implementasikan secara maksimal sehingga operasional seluruh Bank Sampah bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan seperti yang tercantum dalam bab terdahulu, menyatakan bahwa di wilayah Kecamatan Candisari sudah ada kegiatan pemanfaatan kembali (reuse) sampah yang dikelola oleh kelompok warga setempat dalam bentuk Bank sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sudah berjalan dengan baik. Dibawah naungan lembaga Bank sampah, masyarakat sudah mengolah sampah organik menjadi kompos sedangkan sampah yang anorganik diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti kerajinan tas, keset dan lain-lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizah (2008), yang menyebutkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta khususnya masyarakat di Gondolayu Lor sudah berjalan secara baik dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPSS hingga 70%. Hal ini menunjukkan prinsip pengelolaan sampah di Kecamatan Candisari sudah cukup baik.

Untuk bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu di perlukan beberapa sarana pendukung untuk mengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memberlakukan beberapa syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan sarana pendukung tersebut. Pelaksana pengelolaan sampah terpadu adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat yang mendirikan Bank Sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berperan sebagai pembina Bank Sampah. Selain itu, Pemkot Semarang juga melibatkan aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (Reduce, Recycle, Reuse) dengan menggunakan berbagai sarana pendukung yang dimiliki oleh para Bank Sampah. Sampah dipilah menjadi dua jenis, organik dan non organik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah non organik ada yang diolah menjadi barang kerajinan dan ada pula yang langsung dijual.

#### c. Tugas dan Fungsi Pengelola Bank Sampah

Secara umum tugas dan fungsi pengelola Bank sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari sudah sesuai dengan amanah dari perda nomor 6 Tahun 2012, yaitu untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah di masing-masing Bank Sampah berbeda sistemnya, tetapi muaranya sama yaitu untuk memanfaatkan sampah yang ada di wilayah dengan mengadakan pemilahan sehingga menjadi barang

yang bermanfaat serta mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat pembuangan Akhir (TPA).

Dalam pengelolaan sampah terpadu tidak semua Bank sampah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Khususnya hal tersebut dialami oleh para KSM yang mendapatkan sarana bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Akibatnya adalah kualitas produk olahan sampah yang dihasilkan belum diakui oleh masyarakat dan tidak mampu bersaing di pasaran.

Dalam perkembangannya, program pengelolaan sampah terpadu kurang begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya pemerintah kelurahan dan Kecamatan Candisari. Hal ini terlihat dari belum adanya suatu bentuk koordinasi yang berkesinambungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Untuk mendapatkan sarana pendukung pengelolaan sampah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyatakan bahwa masyarakat harus mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dengan pengajuan proposal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan menilai seberapa serius keinginan masyarakat dalam mengelola sampah.

Dalam program pengelolaan sampah terpadu ini, pihak yang lebih mempunyai peran penting adalah masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah sebagai pelaksana aktivitas pengelolaan sampah terpadu di

masing-masing Bank sampah. Sedangkan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berperan sebagai pembina.

## **2. Aspek Sistem Manajemen**

### **a. Proses Perencanaan Program**

Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator) berwenang membuat kebijakan tentang pengelolaan sampah. Sehingga Pemerintah merupakan pihak yang paling tepat mengambil inisiatif (inisiator) agar program Bank sampah ini menjadi gerakan di masyarakat. Dalam hal ini bertindak selaku pemerintah adalah Pemerintah kecamatan Candisari beserta jajaran Kelurahan sekecamatan Candisari.

Dalam rangka menyusun konsep perencanaan, karena nanti yang akan melaksanakan adalah masyarakat, maka masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan. Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam perencanaan, yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui pengurus RT/RW. Pengurus RT/RW di sini adalah pihak yang memiliki kapabilitas sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat. Di tempat lain bisa jadi fasilitator tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, akademisi atau lainnya. Yang terpenting mereka adalah pihak yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah dan memiliki kemampuan sebagai fasilitator.

Hal utama yang harus disampaikan pertama kali dalam sosialisasi adalah tentang manfaat pengelolaan sampah. Untuk memperkuat penjelasan tentang manfaat pengelolaan sampah, pemerintah sebaiknya mengajak pengurus RT/RW untuk melakukan studi banding ke daerah yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah.

Sebagai fasilitator, pengurus RT/RW kemudian berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang manfaat kegiatan pemilahan sampah dan pengalaman daerah lain yang sudah berhasil. Selain itu, pengurus RT/RW juga berusaha menjaring masukan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah. Masukan tersebut kemudian didiskusikan dengan pemerintah untuk menyempurnakan konsep yang sudah ada.

Hasil penyempurnaan konsep menjadi produk perencanaan yang disepakati pemerintah dan masyarakat. Isi perencanaan memuat paling tidak: mekanisme pengelolaan (meliputi: operasional, pengendalian, pengawasan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan), peran masyarakat dan Pemerintah, pembentukan organisasi pengelola bank Sampah, sarana prasarana.

Program kerja bank Sampah disusun berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus Bank Sampah dengan masyarakat sekitar yang difasilitasi oleh lembaga RT/RW setempat. Hasil musyawarah inilah yang menjadi dasar dari para pengurus untuk melaksanakan

kegiatan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada dalam cakupan Bank Sampah tersebut. Jadi karena berdasarkan hasil musyawarah maka kesepakatan yang ada bersifat mengikat kepada seluruh warga untuk ikut mensukseskan apa yang sudah menjadi program dari Bank Sampah ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Terry dalam Sistaningrum (2010:167) yang menyatakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran.

#### b. Pengelolaan Keuangan

Sistem pengelolaan keuangan Bank Sampah yang ada di wilayah kecamatan Candisari berasal dari hasil penjualan produk sampah serta dari iuran para anggota. Pengelolaan keuangan ini sepenuhnya ditangani oleh Pengurus Bank Sampah terutama oleh Bendahara Bank Sampah. Adapun para Pengurus Bank Sampah tidak memperoleh honor sehingga kerjanya benar-benar bersifat sukarela dengan jiwa sosial yang tinggi. Hasil dari pengelolaan Bank Sampah juga dinikmati oleh para anggotanya, seperti di Bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari saat ini berhasil membantu anggotanya yang tidak mampu dengan membayarkan iuran BPJS bagi 7 (tujuh) orang warganya yang tidak mampu.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan teori tentang Bank Sampah bahwa Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan.

Pemerintah dengan dibantu oleh pengurus RT/RW, melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola Bank Sampah. Hal ini dilakukan agar program yang sudah menjadi kebijakan Pemerintah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya pengurus RT/RW melaporkan hasil kegiatan monitoring dan supervisinya kepada pemerintah melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

#### c. Proses Evaluasi dan Pengawasan

Proses evaluasi dan pengawasan Bank Sampah dilaksanakan secara terbuka oleh pengurus Bank Sampah dengan melibatkan tokoh masyarakat yang ada di wilayah. Selain itu pembinaan juga dilaksanakan oleh instansi terkait terutama dari Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2012 pasal Ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan “melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain”.

Pemerintah melakukan evaluasi tahunan berdasarkan laporan yang diterima dari pengelola bank Sampah dan pengurus RT/RW, juga masukan dari masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah dibuat agar efektif dan efisien.

Dalam kaitan dengan evaluasi, fungsi pengurus RT/RW adalah memberi masukan kepada Pemerintah dan pengelola Bank Sampah. Disamping itu juga menjangkau masukan dari masyarakat dengan cara memberi masukan kepada Pemerintah dan pengelola Bank sampah.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh bank Sampah menjadi masukan bagi pemerintah. Menjadi kewajiban oleh Pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bank Sampah.

#### d. Akuntabilitas Penyelenggaraan Bank Sampah

Secara berkala Bank Sampah mengadakan rapat pengurus sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Bank Sampah. Rapat pengurus diadakan berdasarkan kesepakatan pengurus Bank sampah dengan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi. Rapat ini menyampaikan perkembangan Bank sampah sampai dengan pembagian hasil pengelolaan Bank Sampah yang bisa dibagikan kepada masyarakat.

Pengelola bank Sampah melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah agar sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. Dalam hal ini pengelola dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW setempat. Pengelola membuat laporan rutin, yang akan disampaikan ke Pemerintah dan masyarakat sesuai mekanisme yang ada. Laporan rutin ke masyarakat dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga, seperti pertemuan di tingkat RT.

Hal ini sesuai dengan peraturan daerah yang tercantum dalam Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012, Bab IV, Pasal 7 ayat 1, poin e, yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup”.

### **3. Aspek Manusia**

#### **a. Proses Komunikasi Antara Pengelola Dengan Masyarakat**

Guna meningkatkan keberadaan Bank Sampah yang ada, pengurus selalu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya Bank Sampah. Sosialisasi dan komunikasi juga dilaksanakan melalui lembaga yang ada mulai dari tingkat RT, RW sampai dengan pihak kelurahan setempat.

Hal ini sudah sesuai dengan teori Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:107)<sup>30</sup> tentang fungsi organisasi yang menyatakan bahwa Organisasi harus menentukan saluran komunikasi melalui unit-unit dalam organisasi jika ingin efisien. Komunikasi ini berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, pelaksanaan bahkan penyimpangan yang timbul. Dalam hal ini dalam penyusunan ataupun penyaluran anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, selanjutnya bertanggungjawab terhadap anggaran tersebut melalui laporan secara periodik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan H.A.R.Tilaar, (2009: 287) yang mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dalam hal ini pengurus sudah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan mensosialisasikan Bank Sampah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut menyukseskan program kebijakan tersebut.

b. Proses Menggerakkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Sampah.

Dalam pengamatan tampak bahwa sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>30</sup> Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. *Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

pemilahan sampah ini belum dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menjadi faktor penghambat pengelolaan sampah di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, karena pemilahan sampah merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan sampah nonkonvensional, sehingga apabila masyarakat belum melakukan pemilahan akan sulit untuk melaksanakan pengelolaan sampah modern atau nonkonvensional.

Masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan fungsi Bank sampah membutuhkan kesabaran dari Pengurus Bank Sampah untuk tidak bosan melaksanakan sosialisasi tentang Bank Sampah. Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus baik melalui formal maupun secara non formal.

Hal ini kurang sejalan dengan Peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 khususnya dalam bab X pasal 46 dan pasal 48 sebagai berikut :

1) Pasal 46

Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2) Pasal 48

a) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- i. Sosialisasi
- ii. Mobilisasi

- iii. Kegiatan gotong royong; dan/atau
  - iv. Pemberian insentif
- b) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara :
- i. Mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan/atau
  - ii. Pemberian insentif dan disinsentif
- c) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- i. Penyediaan sarana komunikasi
  - ii. Aktif dan secara cepat memberi anggapan; dan/atau
  - iii. Melakukan jejaring pendapat aspirasi masyarakat

Meskipun sudah tercantum dalam Perda tersebut namun kenyataannya setiap hari TPA Jatibarang masih menampung sampah dengan jumlah yang sangat besar dari seluruh wilayah di Kota Semarang. Untuk mencegah overload, sampah harus dikurangi secepat mungkin dari sumber sampah yaitu dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya Pemkot Semarang untuk mengantisipasi besarnya muatan sampah di TPA Jatibarang.

c. Kemampuan Dalam Operasionalisasi Bank Sampah

Pengurus Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari sudah sangat baik dalam operasionalisasi Bank Sampah.

Penerapan teknologi sudah dilaksanakan guna meringankan tugas pengelola Bank Sampah dalam mengolah sampah yang masuk. Masyarakat juga sebagian besar sudah mendukung sepenuhnya terhadap keberadaan Bank Sampah ini, dengan melaksanakan pemilahan terhadap sampah rumah tangga mereka.

Kemampuan dari operasionalisasi Bank Sampah ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah yang senantiasa melakukan pendampingan yang dilaksanakan secara berkala. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Perda nomor 6 tahun 2012 pasal 6 huruf f yaitu “memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah”.

#### d. Kemampuan Menghadapi Complain Maupun Dukungan

Pengurus dari Bank Sampah memiliki cara tersendiri terutama dalam menghadapi complain dari masyarakat sekitar lokasi bank sampah. Dengan pendekatan sosial baik secara personal maupun kelembagaan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah mereka, para pengurus bank Sampah bisa menyelesaikan adanya complain yang masuk. Keberadaan lembaga RT / RW juga berperan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) yang membedakan partisipasi

menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Termasuk penerimaan dan penyelesaian komplain serta dukungan yang diberikan untuk Bank Sampah.

e. Peran Stakeholder dalam Penyelenggaraan Bank Sampah

Peran stakeholder terhadap Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Candisari sudah cukup baik akan tetapi dirasakan masih kurang oleh para Pengelola Bank Sampah. Hal ini perlu menjadikan perhatian bagi Pihak kelurahan, Kecamatan maupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam Perda nomor 6 tahun 2012 pasal 6 huruf c disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk “memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”, yang dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh Pihak Bank Sampah.

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan proses berdiri dan berjalannya Bank Sampah yang terdiri dari faktor-faktor yang mendorongnya yaitu pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang ada diwilayah masing-masing. Sehingga, pemerintah dalam hal ini perlu

memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan sampah di Bank Sampah khususnya wilayah Kecamatan Candisari.

Dalam Implementasi pemilahan sampah dengan membentuk lembaga Bank Sampah, pemerintah perlu memberikan bantuan fasilitas termasuk biaya untuk pengelola karena biaya pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah (amanat UU RI no 18 tahun 2008). Pemerintah mengatur dan memberikan insentif & disinsentif. Walaupun masyarakat tidak keberatan dengan adanya retribusi sampah, namun alangkah baiknya jika pemerintah memberikan insentif pada masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Insentif diberikan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat bersemangat melakukan pemilahan sampah. Insentif yang diberikan dapat dalam bentuk pengurangan retribusi bagi warga masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Sedangkan bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah, tetap membayar retribusi. Ini sejalan dengan amanat UU No 18 Th 2008 Pasal 18.

Pemerintah melakukan sosialisasi implementasi untuk mengkampanyekan program, agar pemilahan sampah menjadi gerakan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan pengurus RT/RW. Bersama dengan pengurus RT/RW, pengelola membentuk organisasi kepengurusan dan program kerja dalam bentuk Bank Sampah.

Pemerintah memfasilitasi kegiatan sosialisasi implementasi yang dilakukan oleh pengelola bank Sampah, yang merupakan tanggung pengelola. Dalam hal ini pengelola dapat bekerja sama dengan pengurus

RT/RW. Pengelola menentukan mekanisme pengelolaan sampah, yang meliputi pengambilan sampah dari rumah-rumah dan pengangkutannya hingga ke TPS.

Pengelola Bank Sampah bertanggung jawab mengelola sampah anorganik yang terkumpul, mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan/penjualannya, termasuk pemanfaatan uang hasil penjualan. Bersama dengan pengurus RT/RW, pengelola memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola sampahnya dengan benar. Termasuk di dalamnya memberikan bimbingan dalam pengolahan sampah.

Masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh pengelola, mengolah sampah organiknya menjadi kompos. Masyarakat bertanggung jawab melakukan sosialisasi dalam rumah tangganya (sosialisasi internal). Di tingkat inilah, sebetulnya sosialisasi akan sangat efektif karena dapat dilakukan secara intensif.

Berjalan lancar atau tidaknya suatu bank sampah ditentukan oleh berbagai faktor seperti *availability*, *performance*, dan *quality* (Kristina, 2014). Secara singkat, keefektifitasan bank sampah dilihat dari kemudahan akses bank sampah tersebut, baik untuk nasabah, pengurus, dan stakeholder. Kemudian terdapat pembagian kerja yang jelas, tidak ada penolakan dalam proses pemberdayaan, dan program yang ada berhasil terlaksana serta berdampak signifikan. Keefektifitasan suatu bank sampah

dapat dilihat dari indikator kelembagaan, teknik operasional, pembiayaan, peraturan, dan peran serta masyarakat (Damayanti, 2014). Hal ini sesuai dengan pengelolaan sampah di Bank Sampah Kecamatan Candisari yang sudah mengimplementasikan program Bank Sampah sesuai dengan tahapan-tahapan, prinsip 3R, dan partisipasi masyarakat.

## **2. Permasalahan Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh bank Sampah menjadi masukan bagi pemerintah. Menjadi kewajiban oleh Pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bank Sampah.

Beberapa masalah yang ditemukan dari hasil wawancara dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pengelola Bank Sampah. Peralatan untuk kegiatan pilah sampah masih kurang sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang optimal
- b. Belum adanya sarana armada angkut memadai dan berkapasitas besar yang dapat mempercepat dalam pengangkutan sampah dari TPST ke TPA. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif.
- c. Kurangnya subsidi pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu permasalahan. Pengembangan ini bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan serta kinerja pengelola agar pengelolaan sampah di Bank Sampah lebih optimal dan efektif, serta dapat menerapkan IPTEK terkini yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Dalam pengamatan juga tampak bahwa sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilahan sampah ini belum dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menjadi faktor penghambat pengelolaan sampah di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, karena pemilahan sampah merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan sampah nonkonvensional, sehingga apabila masyarakat belum melakukan pemilahan akan sulit untuk melaksanakan pengelolaan sampah modern atau nonkonvensional.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 dan permasalahan yang ada di sebagian daerah di Indonesia. Pengelolaan sampah yang dilakukan pada suatu daerah akan mempengaruhi kualitas lingkungan pada daerah tersebut meskipun dampaknya tidak kentara secara langsung. Permasalahan dalam sampah perkotaan timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sistem pengumpulan yang tidak tuntas, kurangnya alat angkut sampah, dan terbatasnya kapasitas tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi permasalahan yang khas mencakup aspek teknis, sosial, dan budaya.

### **3. Saran Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa saran tentang permasalahan pengelolaan sampah di Bank Sampah, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi pilah sampah di masyarakat menjadi salah satu saran dari masyarakat, sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah meningkat sehingga operasional Bank Sampah dapat berjalan lebih maksimal.
2. Pengadaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja SDM pengelola Bank Sampah, seperti pelatihan pembuatan produk yang berbahan dasar sampah, dan lain sebagainya.
3. Ketersediaan air bersih, kendaraan pengangkut sampah dari warga, pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik, peran aktif pemerintah dalam pemasaran dan pengembangan ekonomi produktif dari sampah diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah demi terwujudnya Bank Sampah yang lebih baik.
4. Pemberian Bantuan operasional untuk pengurus Bank Sampah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelola dalam mengelola Bank Sampah sehingga didapatkan hasil yang optimal dan mewujudkan tujuan dari Bank Sampah.
5. Diperlukan stimulan untuk sarana mendorong kepedulian warga. Dalam mengelola sampah khususnya melakukan pemilahan dalam membuang sampah. Peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah ini sebenarnya dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya. Pembentukan organisasi

kemasyarakatan pada tingkat RW yang bertugas menggerakkan warga mengelola sampah dengan binaan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang memberikan saran dan ditujukan kepada pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012, Bab IV, pasal 5 yaitu “Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini”.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan amanat undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Mengacu pada pernyataan undang-undang bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah maka harus segera diterapkan pengelolaan sampah yang terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu bisa dilakukan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan disini harus lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah yang efisien itu dapat mengurangi timbulan sampah dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari sumber timbulan yaitu rumah tangga. Hal

itu memang perlu kesadaran dari masyarakat. Jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka timbulan sampah bisa dikurangi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Candisari Kota Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah di wilayah Kecamatan Candisari Kota Semarang telah berhasil dilaksanakan oleh Pengelola Bank Sampah sesuai struktur organisasi yang telah dibentuk dengan menerapkan manajemen organisasi serta didukung oleh segenap masyarakat setempat.
2. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi paradigmatik, yaitu solusi dari paradigma cara mengelola sampah. Paradigma "membuang sampah" yang dalam prakteknya hanya memindahkan sampah, menjadi "mengelola sampah" dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada prakteknya dapat mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang dibuang.
3. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan bank sampah adalah kekurangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bank Sampah. Hal ini menjadi kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut karena pihak Bank Sampah belum mampu untuk memenuhinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pembinaan serta pendampingan oleh Pemerintah Kota Semarang beserta Stakeholder yang terkait terhadap para Pengelola Bank Sampah maupun pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan sampah terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Candisari yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
2. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ditemukan pada penelitian ini melalui implementasi Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga paradigma baru dalam pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu solusi masalah persampahan di masa mendatang.
3. Penelitian yang dilakukan walaupun telah berhasil menemukan manfaat yang besar dari kegiatan pemilahan sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah, namun penelitian yang dilakukan masih terbatas pada penelitian deskriptif. Sehingga untuk dapat menjadi rumusan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih aplikatif membutuhkan kajian lebih lanjut yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim, 2012. *Profil Bank Sampah Indonesia 2012*. Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta
- Asteria, D., 2013. *Model Komunikasi Lingkungan Berperspektif Gender dalam Menyelesaikan Konflik Lingkungan di Perkotaan: Peran Aktivis Perempuan dalam Pengelolaan Konflik Lingkungan Secara Berkelanjutan*. PUPT BOPTN 2013. Universitas Indonesia, Depok.
- Crown Dirgantoro, 2004, *Manajemen Strategik*, Jakarta, Grasindo
- Eka Putri Azrai, Ernawati, Santi Rizkiani, *Hubungan Persepsi Ibu Rumah Tangga Tentang bank Sampah Dengan partisipasi Pengelolaan Bank Sampah Gawes Rukun Kota Tangerang*, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/biosfer/article/view/5570>, diakses tanggal 13 maret 2021
- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat*. Tesis.Semarang:Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Hunger dan Wheelen, 2003. *Manajemen Strategis*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Ismail Putra Munthe, *Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolam* <http://repository.uinsu.ac.id/5470/1/ISMAIL%20PUTRA%20MUNTHE.pdf>, diakses tanggal 13 Maret 2021
- Jean Angraini, *Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir Rt: 02 Rw: 09) Bojongsari Kota Depok*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34387/1/JEAN%.pdf>
- Jumar, Fitriyah, N., dan Kalalinggie, R., 2014. *Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Journal Administrative Reform, 2(1):771-782
- Kristina, H., 2014. *Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah di Indonesia*. Jurnal Teknik Industri, 9(1):19-28.
- Mahbuban MS, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Studi pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo*. Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/25114/>

- Mochamad Mukhlis. *Pengelolaan Bank sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (studi pada Bank sampah Kota Malang)*, etheses.uin-malang.ac.id/13363/1/15801010
- Moleong, Lexy J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Moersid, Ali, 2004. *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurmandi, Achmad, 1999. *Manajemen Perkotaan. Lingkaran Bangsa*, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo
- Oktyaan Praditya, *Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sekaran Kota Semarang*, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/3046>
- Opcit, *Rencana Umum Pengelolaan Sampah*, 2018.
- Paramita Adhinul Putera, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten tana Tidung*, <http://repository.ut.ac.id/7611/>
- Purba, H.D., Meidiana, C., dan Adrianto, D.W., 2014. *Waste Management Scenario through Community Based Waste Bank: A Case Study of Kepanjen District, Malang Regency, Indonesia*. International Journal of Environmental Science and Development, 5(2):212-216
- Riswan, Sunoko, H.R., dan Hadiyanto, A., 2011. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 9(1):31-38.
- Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. *Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)*., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemirat. (2000). *Kesehatan Lingkungan. Bandung*. Universitas Gadjah Mada University Press
- Sistaningrum., 2010, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Struktur Penguasaan tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani.*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudrajat, HR. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penerbit Swadaya
- Sukanto R., 2003., *Manajemen Strategi*. Yogyakarta, BPFE

- Tjiptoherijanto, *Kelembagaan Kependudukan Era Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi Negara, 2005.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Widodo, *Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik*, Jurnal Administrasi Negara-volume iii\vol.iii, no.1, 2000.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarso, H., dan Larasati, A., 2011. *Dari Sampah Menjadi Upah: Inovasi Pengolahan Sampah di Tingkat Akar Rumput Kasus Program Bank Sampah "Sendu" di Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan*. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 18(1):43-59.
- Wrihatnolo, Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi kelima Tahun 2007
- Revisi Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2018, COWI, DENMARK 2018
- Semarang Dalam Angka 2020, BPS, Badan Pusat StatistikKotaSemarangsemarangkota.bps.go.id
- Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1086-1095 | 1087 (<http://banksampahbantul.or.id>).

## **Lampiran 1**

### **INSTRUMEN UNTUK APARAT PEMERINTAHAN KELURAHAN DAN KECAMATAN**

#### **A. Identitas Informan**

1. Nama lengkap dengan gelar :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan :
5. Kelurahan/Kecamatan :
6. Alamat Rumah :
7. No Kontak :

#### **B. Pengelolaan Sampah**

1. Berapa jumlah sampah yang terangkut/hari /Kelurahan?
2. Apakah anda tahu Perda Pengelolaan sampah ? Sebutkan nomornya !
3. Siapa yang mengelola sampah di tempat anda ?
4. Apakah anda memiliki Bank Sampah ?
5. Sejak kapan Bank sampah ada ?
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah tersebut ?
7. Apakah terdapat anggaran khusus dalam pengelolaan sampah ?

### C. Implementasi Bank Sampah

Aspek	Unsur	Pertanyaan	Jawaban	
<b>Struktur</b>	Tatatan Pengelolaan Bank Sampah	1. Siapa yang mengelola Bank Sampah ?		
		2. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah ?		
		3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar kelurahan ?		
	Mekanisme dan prosedur pengelolaan organisasi Bank Sampah	4. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengelolaan organisasi Bank Sampah		
		Tugas dan fungsi pengelola Bank Sampah	5. Apa saja tugas dan fungsi pengelola Bank Sampah ?	
		Proses perencanaan program	6. Bagaimana proses perencanaan bank sampah dilakukan ?	
7. Apakah bank sampah mendapatkan dukungan				

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		dana operasional ? Dari mana dana tersebut.	
		8. Jika tidak darimana biaya operasional bank sampah ?	
	Pengelolaan keuangan	9. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan bank sampah ?	
		10. Dari mana modal bank sampah ini ?	
		11. Apakah pengelola mendapatkan upah ? Berapa perbulan	
		12. Bagaimana cara pengupahannya	
	Proses evaluasi dan pengawasan	13. Apakah pernah melakukan evaluasi penyelenggaraan bank sampah ?	
		14. Siapa dan bagaimana caranya ?	
	Akuntabilitas	15. Bagaimana mekanisme	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	penyelenggaraan bank sampah	pertanggungjawaban pengelola bank sampah dilakukan ?	
		16. Menurut anda bagaimana kinerja pengurus dalam pengelolaan bank sampah ?	
<b>Manusia</b>	Proses komunikasi antara pengelola dengan masyarakat	17. Bagaimana model komunikasi yang digunakan untuk penyadaran masyarakat ?	
		18. Siapa yang melakukan ?	
	Proses menggerakan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap sampah	19. Bagaimana sesungguhnya pengetahuan masyarakat tentang sampah ?	
		20. Bagaimana sikap mereka terhadap keberadaan bank	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		sampah ?	
		21. Bagaimana implementasi dukungan masyarakat bank sampah	
		22. Sejauh mana kesadaran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah?	
	Kemampuan dalam operasionalisasi bank sampah	23. Apakah masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah ?	
	Kemampuan menghadapi complain maupun dukungan	24. Bagaimana tingkat kemampuan petugas pengolah sampah dan mengoprasionalisasikan bank sampah ?	
		25. Apakah pernah terjadi complain warga atas keberadaan bank sampah	
		26. Hal-hal apa yang di	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		masalahkan ?	
		27. Bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan complain tersebut ?	
		28. Adakah masyarakat yang mendukung bank sampah ? Dalam bentuk apa ?	
		29. Bagaimana penilaian anda terhadap peran masyarakat ini ?	
	Peran stakeholder dalam penyelenggaraan bank sampah.	30. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah ?	
		31. Bagaimana penilaian anda terhadap peran stakeholder ?	
<b>Masalah dan saran</b>	Masalah dan saran	1. Permasalahan apa yang anda alami di Bank	

Aspek	Unsur	Pertanyaan	Jawaban
		Sampah ?	
		2. Apa saran-saran anda untuk perbaikan bank sampah yang akan datang ?	

## Lampiran 2

### INSTRUMEN UNTUK PENGELOLA BANK SAMPAH

#### A. Identitas Informan

1. Nama lengkap dengan gelar :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan di Bank sampah :
5. Kelurahan/Kecamatan :
6. Alamat Rumah :
7. No Kontak :
8. Sejak kapan jadi pengelola bank sampah :

#### B. Pengelolaan Sampah

8. Berapa jumlah sampah yang terangkut/hari /Kelurahan?
9. Siapa yang mengelola sampah di tempat anda ?
10. Sejak kapan Bank sampah ada ?
11. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah tersebut ?
12. Apakah terdapat anggaran khusus dalam pengelolaan sampah ?

#### C. Implementasi Bank Sampah

Aspek	Unsur	Pertanyaan	Jawaban
Struktur	Tatatan	b. Siapa yang mengelola	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	Pengelolaan Bank Sampah	Bank Sampah ?	
		c. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah ?	
		d. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antar kelurahan ?	
	Mekanisme dan prosedur pengelolaan organisasi Bank Sampah	e. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengelolaan organisasi Bank Sampah	
		f. Selama ini apakah organisasi tanggap terhadap oprasional bank sampah?	
	Tugas dan fungsi pengelola Bank Sampah	g. Apa saja tugas dan fungsi pengelola Bank Sampah ?	
	<b>Managerial</b>	Proses perencanaan program	h. Bagaimana proses perencanaan bank sampah dilakukan ?
i. Apakah bank sampah mendapatkan dukungan			

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		dana operasional ? Dari mana dana tersebut.	
		j. Apakah anda dibayar untuk mengelola bank sampah ini ? Berapa ?	
		k. Jika tidak darimana biaya operasional bank sampah ?	
	Pengelolaan keuangan	l. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan bank sampah ?	
		m. Dari mana modal bank sampah ini ?	
		n. Apakah pengelola mendapatkan upah ? Berapa perbulan	
		o. Bagaimana cara pengupahannya	
	Proses evaluasi dan pengawasan	p. Apakah pernah melakukan evaluasi penyelenggaraan bank sampah ?	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		q. Siapa dan bagaimana caranya ?	
		r. Apakah Pemda pernah melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan bank sampah ini ?	
	Akuntabilitas penyelenggaraan bank sampah	s. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelola bank sampah dilakukan ?	
		t. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan dari Pemkot ?	
		u. Apakah pernah ada kasus berkaitan dengan penggelapan uang misalnya ?	
<b>Manusia</b>	Proses komunikasi antara pengelola dengan	v. Bagaimana model komunikasi yang digunakan untuk penyadaran masyarakat	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	masyarakat	?	
		w. Siapa yang melakukan ?	
	Proses menggerakan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat	x. Bagaimana sesungguhnya pengetahuan masyarakat tentang sampah ?	
	terhadap sampah	y. Bagaimana sikap mereka terhadap keberadaan bank sampah ?	
		z. Bagaimana implementasi dukungan masyarakat bank sampah	
		aa. Sejauhmana kesadaran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah?	
	Kemampuan dalam	bb. Apakah masyarakat terlibat dalam	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	operasionalisasi	pengelolaan sampah ?	
	bank sampah	cc. Bagaimana tingkat kemampuan petugas pengolah sampah dan mengoprasionalisasikan bank sampah ?	
	Kemampuan menghadapi complain maupun dukungan	dd. Apakah pernah terjadi complain warga atas keberadaan bank sampah	
		ee. Hal-hal apa yang di masalahkan ?	
		ff. Bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan complain tersebut ?	
		gg. Adakah masyarakat yang mendukung bank sampah ? Dalam bentuk apa ?	
		hh. Bagaimana penilaian anda terhadap peran	

<b>Aspek</b>	<b>Unsur</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		masyarakat ini ?	
	Peran stakeholder dalam penyelenggaraan bank sampah.	ii. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah ?	
		jj. Bagaimana penilaian anda terhadap peran stakeholder ?	
<b>Masalah dan saran</b>	Masalah dan saran	kk. Permasalahan apa yang anda alami di Bank Sampah ?	
		ll. Apa saran-saran anda untuk perbaikan bank sampah yang akan datang ?	

### Lampiran 3

#### INSTRUMEN UNTUK PEKERJA DI BANK SAMPAH

##### A. Identitas Informan

1. Nama lengkap :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Sejak kapan bekerja di bank sampah :
5. Alamat tempat tinggal : Kelurahan.....Kecamatan
6. No Kontak :

##### B. Pengelolaan Sampah

7. Jam berapa mulai bekerja ?
8. Apakah anda tahu Perda Pengelolaan sampah ? Sebutkan nomornya !
9. Mengapa anda mau bekerja di sini ?
10. Apakah anda mendapatkan upah ? Berapa ?
11. Bagaimana sarana dan prasarna di bank Sampah ini khususnya perlindungan bagi anda ?
12. Bagaimana dukungan masyarakat akan bank sampah ini ?
13. Siapa yang paling berperan di bank sampah ini ?
14. Pernahkan dikunjungi pejabat pemkot ? Siapa dan berapa kali dalam sebulan ?
15. Permasalahan apa yang anda alami di Bank Sampah ?
16. Apa saran-saran anda untuk perbaikan bank sampah yang akan datang

## Lampiran 4

### INSTRUMEN KETUA RT DAN RW DI WILAYAH KECAMATAN CANDISARI

#### A. Identitas Informan

1. Nama lengkap :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Sejak kapan jadi RT.RW :
5. Alamat tempat tinggal : Kelurahan.....Kecamatan
6. No Kontak :

#### B. Pengelolaan Sampah

1. Apakah anda tahu Perda Pengelolaan sampah ? Sebutkan nomornya !
2. Siapa yang mengelola sampah di tempat anda ?
3. Sejak kapan Bank sampah ada ?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah tersebut ?
5. Apakah terdapat anggaran khusus dalam pengelolaan sampah ?
6. Bagaimana sarana dan prasarna di bank Sampah ini khususnya perlindungan bagi anda ?
7. Bagaimana dukungan masyarakat akan bank sampah ini ?
8. Siapa yang paling berperan di bank sampah ini ?
9. Pernahkan dikunjungi pejabat pemkot ? Siapa dan berapa kali dalam sebulan ?
10. Apa yang anda lakukan untuk mendorong masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ?
11. Permasalahan apa yang anda alami di Bank Sampah ?
12. Apa saran-saran anda untuk perbaikan bank sampah yang akan datang ?

## Lampiran 5

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ketua bank Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari

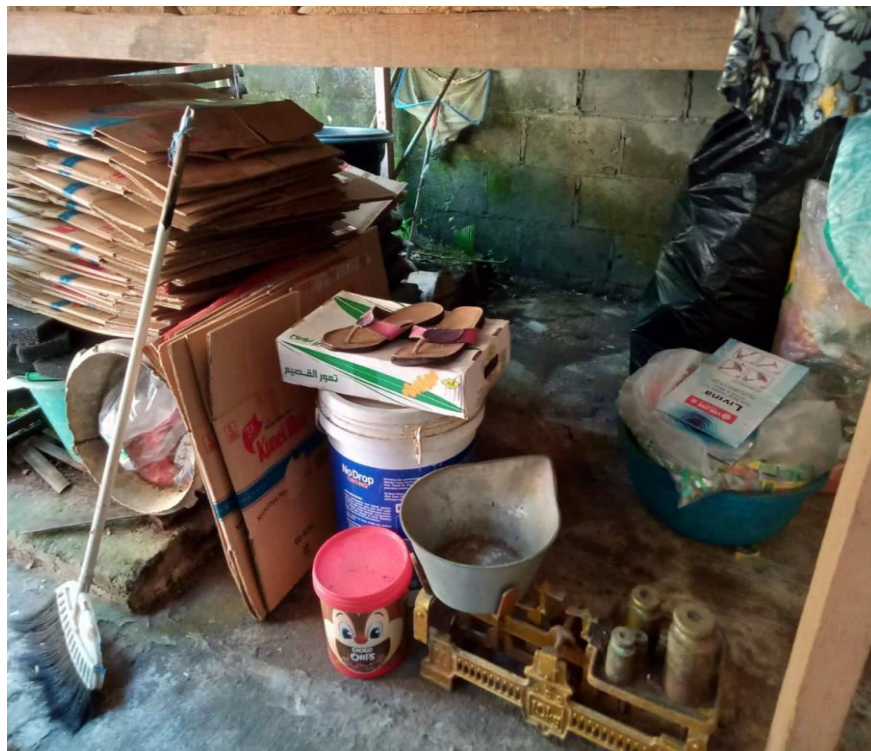


Bangunan Gedung Baks Sampah Mugi Berkah Sari Kelurahan Tegalsari





Wawancara dengan Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh



Peralatan Bank Sampah Melati Kelurahan Jatingaleh



Wawancara dengan Ketua Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang



Beberapa Piagam Penghargaan yang diperoleh Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang



Kegiatan pilah sampah di Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang

DATA PENKULAH SAMPAH				JUMLAH SAMPAH YANG DIKELOLA														
NO	BULAN	TONASE (KG)	NOMINAL(Rp)	No	jenis barang	Bulan (KG)												Jumlah
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JANUARI	576,9	1.247.000	1	Kardus	183	12,1											
2	FEBRUARI	307,5	765.280	2	Marga	37,5	4,8											
3	MARET			3	Koran	-	-											
4	APRIL			4	Buku	12	4,5											
5	MAY			5	Arsip	216,5	2,1											
6	JUNI			6	Majalah / A. Kertas	-	-											
7	JULI			7	Kerasan	-	-											
8	AGUSTUS			8	Botol Plastik	17	2,2											
9	SEPTEMBER			9	Gelas plastik	2	3,5											
10	OKTOBER			10	Plastik putih	4	9											
11	NOVEMBER			11	Botol Kaca	12	3,8											
12	DESEMBER			12	Kaleng / Baki	7	7											
				13	Aluminium	1,8	1,5											
				14	Ember campur	3,5	17,5											
				15	Galon / ember kecil	2,5	12,2											
	JUMLAH																	

Rekapitulasi Data Sampah yang Dikelola Bank Sampah Raflesia Kelurahan Jomblang



Alur Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah

**DAFTAR HARGA SAMPAH ANORGANIK**  
Bank Sampah "RAFLESIA"  
**2023**

NO	NAMA PRODUK	HARGA /KG
1	MAJALAH	Rp 800.00
2	DUZ COKLAT	Rp 1.500.00
3	PLASTIK PUTIH	Rp 800.00
4	CAMPUR	Rp 1.000.00
5	BOTOL AQUA BERSIH	Rp 2.000.00
6	BOTOL AQUA <b>KOTOR</b>	Rp 1.000.00
7	BOTOL PLASTIK CAMPUR	Rp 1.000.00
8	MARGA	Rp 500.00
9	KALENG	Rp 1.000.00
10	BESI	Rp 2.500.00
11	KORAN	Rp 4.000.00
12	BUKU / KERTAS BURAM	Rp 800.00
13	TABLOID	Rp 1.200.00
14	KERTAS PUTIH / ARSIP	Rp 1.000.00
15	BOTOL KECAP / FRESH	Rp 300.00
16	BOTOL SYRUP ( ABC , MARJAN )	Rp 50.00
17	PLASTIK KERAS ( TOPLES KERAS )	Rp 800.00
18	PIPA	Rp 800.00
19	EMBER CAMPUR	Rp 1.500.00
20	GALON PER 1-KG	Rp 1.500.00
21	BOTOL BELING MINUMAN	Rp 500.00
22	KERTAS SEMEN	Rp 1.500.00
23	KARUNG BERAS	Rp 300.00
24	ALUMUNIUM	Rp 8.000.00

Daftar harga Sampah Anorganik di Bank Sampah Raflesia

